

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN
PADA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LABUAN
PROVINSI BANTEN**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Manajemen Perikanan**

Disusun Oleh :

ERWIN SURYANA
NIM 014803846

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2008**

ABSTRAK

Erwin Suryana. Analisis Sistem Pengelolaan Pelabuhan Perikanan pada Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan Provinsi Banten. Dibimbing oleh Dr. Eko Sri Wiyono, M.Sc dan Dr. AA Ketut Budiastira, M.Ed.

Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan merupakan salah satu pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional pelabuhan yang cukup tinggi di Provinsi Banten. Namun demikian pengguna jasa kepelabuhanan masih mengeluhkan pelayanan yang belum memuaskan pada pelabuhan ini. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengelolaannya ada sub sistem yang tidak berfungsi optimal. Untuk mengetahui komponen mana yang tidak berfungsi optimal maka dilakukan analisis sistem yang ada secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi aktual pengelolaan pelabuhan perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan, membandingkan sistem pengelolaan yang ada dengan kaidah-kaidah pengelolaan pelabuhan perikanan, dan menganalisis dan merekomendasikan alternatif sistem pengelolaan pelabuhan perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan dalam rangka memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan secara maksimal.

Berdasarkan identifikasi sistem yang dilakukan terdapat beberapa sub sistem dalam pengelolaan pelabuhan meliputi sub sistem sumberdaya ikan, fasilitas pelabuhan, aktivitas, dan kelembagaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini juga sesuai dengan sub sistem di atas yakni analisis sumberdaya ikan dengan deskripsi pola musim penangkapan ikan yang didaratkan di pelabuhan, analisis fasilitas dengan perhitungan proporsi fasilitas pelabuhan, analisis aktivitas dengan deskripsi aktivitas kepelabuhan berdasarkan pengamatan langsung dan wawancara, serta analisis kelembagaan dengan metode analisis stakeholder dalam pengelolaan pelabuhan dan analisis peraturan perundang-undangan yang mendukung penyelenggaraan kepelabuhanan. Untuk penetapan strategi pengembangan pelabuhan perikanan digunakan metode *analysis hierarchy process* (AHP).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan masih memerlukan upaya peningkatan terkait aspek fasilitas, sosial dan kelembagaan pelabuhan perikanan. Aspek fasilitas terkait ketersediaan prasarana pokok dan fungsional yang belum memadai, sedangkan aspek sosial menyangkut pelayanan, kenyamanan dan keamanan dalam penyelenggaraan PPP Labuan. Dalam aspek kelembagaan diperlukan pembentukan organisasi pengelola pelabuhan, sumberdaya manusia, dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukung penyelenggaraan PPP Labuan. Dalam hal sumberdaya ikan dengan melihat pola musim penangkapan, tingkat produksi serta jenis ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan disimpulkan bahwa keragaman jenis ikan yang didaratkan sangat dipengaruhi oleh keragaman unit penangkapan (kapal dan alat penangkapan ikan). Untuk mendorong peningkatan ketersediaan sumberdaya ikan dapat dilakukan dengan melakukan manajemen penangkapan yang berorientasi pada pengaturan alat penangkapan ikan serta perbaikan fasilitas pelabuhan yang dapat mendorong peningkatan pendaratan armada penangkapan lain (khususnya yang belum ada di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan) untuk mendaratkan hasil penangkapannya di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan. Untuk aspek fasilitas diperlukan penambahan fasilitas dermaga sepanjang 160 meter, dan penambahan kedalaman kolam pelabuhan sedalam 1 – 2 meter. Selain itu diusulkan integrasi gedung pelelangan menjadi 1 (satu) gedung pelelangan yang lebih representatif dan higienis. Kebijakan pengembangan

Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan yang paling prioritas adalah pengembangan fasilitas pelabuhan, kemudian prioritas kedua adalah meningkatkan pelayanan jasa kepelabuhanan, dan prioritas ketiga adalah pengembangan lembaga pengelola pelabuhan

ABSTRACT

Erwin Suryana. Analysis of Fishing Port Management System at Labuan Coastal Fishing-Port, Banten Province. Supervised by Dr. Eko Sri Wiyono, M.Sc and Dr. AA Ketut Budiastra, M.Ed.

Labuan Coastal Fishing-Port is one of the busiest fishing ports in Banten Province. Unfortunately many port users still have been feeling unsatisfied to the port management services. It indicates that one or more subsystems of the port management are not optimally functioning. To find out which component of the sub systems not optimally running, it is necessary to analysis the overall subsystems taking place in the port management. The objectives of the study are to figure out the actual condition of port management system of Labuan Coastal Fishing-Port, to compare the existing port management system with the regulation principles of fishing port management system, and to analysis and put some recommendations regarding the best alternative of fishing port management system to be applied at Labuan Coastal Fishing-Port for its maximum services.

According to the identification that has been conducted during the study, the fishing port management consists of several subsystems, which are fish resource, port facilities, port activities, and port organization. Therefore, the method of analysis applied in this study follows those subsystems, in which fish resource is analyzed by describing the seasonal patterns of fishing activities; port facilities is analyzed by examining port facilities proportion; port activities is analyzed by describing port activities through direct observation and interview; and port organization is analyzed by stakeholders analysis and regulation analysis. To determine fishing port development strategy, AHP (Analytical Hierarchy Process) is applied.

The results of the study show that the management of Labuan Coastal Fishing-Port generally still needs some improvements regarding to the aspects of facility, social and fishing port organization. Facility aspect is related to the availability of basic infrastructures and functional instruments which are still insufficient, while social aspect is related to port services, comfortability and security which are still far from satisfaction. For port organization aspect, it is required to develop the organization board, fill in the positions with capable human resources, and prepare some legal regulations for fishing port management. In regards to fish resource, by analyzing the seasonal patterns of fishing activities, fish production level and fish composition are influenced by the diversity of fishing units (type of boats and fishing gears). To increase fish stock, it can be achieved by regulating fishing units/ gears and by improving port facilities that may encourage other types fishing units/gears to come and operate in Labuan Coastal Fishing-Port. For the facility aspect, the port still needs some improvements about 160 meters along side of the quay and pool of the port asks for 1-2 meters deeper. Besides, it is also suggested for the fish auction building to be integrated into one representative and hygienic building. From the analysis of Labuan Coastal Fishing-Port development, it is concluded that the most high priority

is facility improvements, the second priority is improvement of port services and the third priority is development of organization board of fishing port management.

UNIVERSITAS TERBUKA

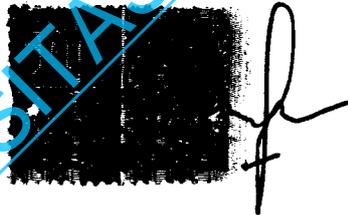
**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN PERIKANAN**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “Analisis Sistem Pengelolaan Pelabuhan Perikanan pada Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan Provinsi Banten” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, 05 Agustus 2008
Yang Menyatakan



(ERWIN SURYANA)
NIM. 014803846

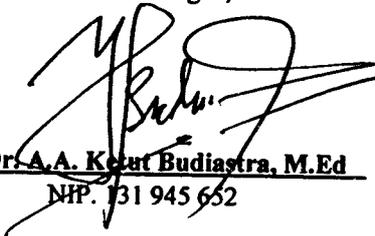
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : "Analisis Sistem Pengelolaan Pelabuhan Perikanan pada Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan Provinsi Banten"

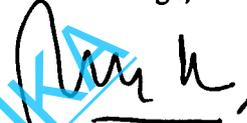
Penyusun TAPM : Erwin Suryana
NIM : 014803846
Program Studi : Magister Manajemen Perikanan
Hari/Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing II,


Dr. A.A. Ketut Budiastra, M.Ed
NIP. 131 945 652

Pembimbing I,


Dr. Eko Sriwiyono, M.Sc
NIP. 132 158 426

Mengetahui
Asisten Direktur Program Pascasarjana




P. Suciati, M.Sc
NIP. NIP.131467652

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PERIKANAN

PENGESAHAN

Nama : Erwin Suryana
NIM : 014803846
Program Studi : Magister Manajemen Perikanan (MMP)
Judul Tesis : Analisis Sistem Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
pada Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan Provinsi Banten

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen Perikanan Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 03 September 2008
W a k t u : Pukul 13.00 s.d. 15.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

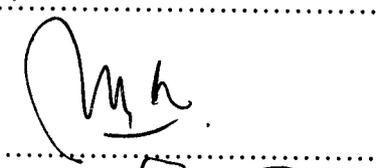
Ketua Komisi Penguji
Dr. Suciati


:

Penguji Ahli
Dr. Djisman Manurung


:

Pembimbing I
Dr. Eko Sriwiyono, S.Pi, M.Si


:

Pembimbing II
Dr. AA. Ketut Budiastira


:

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan judul "ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN PADA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LABUAN PROVINSI BANTEN".

Berkenaan dengan terselesaikannya TAPM ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada beberapa pihak sebagai berikut.

1. Asisten Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka Ibu Dr. Suciati, M.Sc yang telah memberikan pengesahan atas hasil penelitian ini
2. Kepala Bidang Program Studi Magister Manajemen Perikanan (MMP) Ibu Drs. Agnes P Sudarmo, MA atas penyelenggaraan Program MMP selama penulis mengikuti perkuliahan sampai dengan melakukan penelitian
3. Bapak Dr. Eko Sriwiyono, M.Sc, selaku Pembimbing I yang memberikan arahan dan bimbingan selama penulis melakukan penelitian
4. Bapak Dr. AA Ketut Budiastira, M.Ed, selaku Pembimbing II yang telah *consern* memberikan bimbingan penulisan ini, terutama pada aspek metode penulisan karya ilmiah
5. Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, Ir. H. Suyitno, MM yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Pascasarjana UT
6. Bapak Kepala Bidang Sumberdaya Kelautan DKP Provinsi Banten, H. Mahyudin, A.Pi, MM yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini, khususnya terkait penyediaan informasi teknis PPP Labuan
7. Istriku Tercinta, Kiki Nurfalaqiah, S.Pi beserta kedua putriku "si kembar" Annisa Fauziyyah Ramadhani dan Salma Fathinah Ramadhani yang senantiasa memberikan inspirasi, semangat dan motivasi untuk mencapai kesuksesan yang hakiki.

Kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penelitian ini sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, September 2008

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR LAMPIRAN | vi |
| | |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 3 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Kegunaan Penelitian | 4 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian | 4 |
| F. Kerangka Pemikiran | 4 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| A. Pengertian Sistem dan Analisis Sistem | 6 |
| B. Pengertian Pelabuhan Perikanan | 9 |
| C. Klasifikasi Pelabuhan dan Pelabuhan Perikanan | 10 |
| D. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan | 12 |
| E. Fasilitas Pelabuhan | 18 |
| 1. Fasilitas Pokok | 18 |
| 2. Fasilitas Fungsional | 19 |
| 3. Fasilitas Penunjang | 19 |
| F. Kelembagaan | 19 |
| | |
| III. METODOLOGI | 22 |
| A. Desain Penelitian | 22 |
| B. Populasi dan Sampel | 22 |
| C. Instrumen Penelitian | 22 |
| D. Prosedur Pengumpulan Data | 23 |

| | |
|---|-----------|
| E. Metode Analisis Data | 24 |
| 1. Pendekatan Sistem | 24 |
| 2. Analisis Sub Sistem Sumberdaya Ikan | 24 |
| 3. Analisis Sub Sistem Fasilitas | 25 |
| 4. Analisis Sub Sistem Aktivitas | 26 |
| 5. Analisis Sub Sistem Kelembagaan | 27 |
| 6. Analisis Kebijakan Pengembangan PPP Labuan | 27 |
| | |
| IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN | 30 |
| A. Kondisi Geografis | 30 |
| B. Prasarana Pelabuhan | 31 |
| 1. Fasilitas Pokok | 31 |
| 2. Fasilitas Fungsional | 32 |
| 3. Fasilitas Penunjang | 33 |
| C. Tingkat Operasional Pelabuhan | 33 |
| 1. Jumlah Armada | 33 |
| 2. Alat Tangkap | 35 |
| 3. Produksi Perikanan | 35 |
| 4. Jumlah Nelayan | 36 |
| D. Analisis Sistem | 37 |
| E. Analisis Sub Sistem Sumberdaya Ikan | 39 |
| F. Analisis Sub Sistem Fasilitas | 41 |
| 1. Panjang Dermaga | 44 |
| 2. Luas Kolam Pelabuhan | 44 |
| 3. Kedalaman Kolam Pelabuhan | 45 |
| 4. Luas Gedung Pelelangan | 45 |
| G. Analisis Sub Sistem Aktivitas | 47 |
| 1. Proses Pembongkaran dan Penyortiran Ikan | 47 |
| 2. Pengangkutan ke TPI | 48 |
| 3. Penanganan Ikan di TPI | 48 |
| 4. Proses Pelelangan Ikan | 49 |

| | |
|---|----|
| 5. Penggunaan Es dalam Kegiatan Penanganan Ikan | 51 |
| H. Analisis Sub Sistem Kelembagaan | 52 |
| I. Analisis Kebijakan Pengembangan PPP Labuan | 56 |
| 1. Perbandingan Antar Kriteria | 56 |
| 2. Perbandingan Antar Sub Kriteria | 57 |
| 3. Perbandingan Antar Alternatif Kebijakan | 60 |
| | |
| V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI | 62 |
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Rekomendasi | 63 |

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| 1. Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran | 5 |
| 2. Gambar 4.1. Lokasi PPP Labuan | 30 |
| 3. Gambar 4.2. Desain Pengembangan PPP Labuan | 31 |
| 4. Gambar 4.3. Komposisi Armada Penangkapan Ikan di PPP Labuan, 2006 | 34 |
| 5. Gambar 4.4. Identifikasi Permasalahan, Faktor Penghambatt dan Kebutuhan Pengembangan PPP Labuan | 37 |
| 6. Gambar 4.5. Pola Hubungan Antar Instansi di PPP Labuan | 39 |
| 7. Gambar 4.6. Alur Proses Aktivitas di PPP Labuan | 47 |
| 8. Gambar 4.7. Ahur Proses Pendaratan dan Pengangkutan Ikan di PPP Labuan | 48 |

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| 1. Tabel 2.1. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan | 12 |
| 2. Tabel 2.2. Lembaga Terkait di Pelabuhan Perikanan | 20 |
| 3. Tabel 3.1. Instrumen Penelitian | 22 |
| 4. Tabel 4.1. Perkembangan Armada Penangkapan Ikan di PPP Labuan, 2000 – 2006 ... | 34 |
| 5. Tabel 4.2. Perkembangan Alat Tangkap di PPP Labuan, 2000 – 2006 | 35 |
| 6. Tabel 4.3. Perkembangan Produksi Penangkapan Ikan di PPP Labuan, 2000 – 2006 ... | 36 |
| 7. Tabel 4.4. Jumlah Nelayan di PPP Labuan | 37 |
| 8. Tabel 4.5. Perkiraan Pola Musim Penangkapan yang didaratkan di PPP Labuan | 40 |
| 9. Tabel 4.6. Perbandingan Produksi Ikan yang didaratkan dengan jumlah kapal yang beroperasi di PPP Labuan | 41 |
| 10. Tabel 4.7. Jumlah Kunjungan Kapal setiap Hari di PPP Labuan, 2008 | 42 |
| 11. Tabel 4.8. Prosentase Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan PPP Labuan, 2008 | 42 |
| 12. Tabel 4.9. Kondisi Fasilitas PPP Labuan | 43 |
| 13. Tabel 4.10. Perbandingan fasilitas pelabuhan yang dibutuhkan dengan kondisi aktual fasilitas di PPP Labuan | 46 |
| 14. Tabel 4.11. Analisis <i>Stakeholder</i> PPP Labuan | 52 |
| 15. Tabel 4.12. Pemetaan Peraturan Perundang – Undangan yang Mendukung Operasional PPP Labuan | 54 |
| 16. Tabel 4.13. Perbandingan Antar Kriteria | 56 |
| 17. Tabel 4.14. Perbandingan Antar Sub Kriteria dalam Aspek Sumberdaya Ikan | 57 |
| 18. Tabel 4.15. Perbandingan antar Sub Kriteria dalam Aspek Sosial | 58 |
| 19. Tabel 4.16. Perbandingan Antar Sub kriteria dalam Aspek Ekonomi Daerah | 58 |
| 20. Tabel 4.17. Perbandingan Antar Sub Kriteria dalam Aspek Fasilitas | 59 |
| 21. Tabel 4.18. Perbandingan Antar Sub Kriteria dalam Aspek Kelembagaan | 60 |
| 22. Tabel 4.19. Perbandingan Antar Alternatif Kebijakan | 61 |

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Hasil Proses Hirarki Analitik :**
 - a. Perbandingan Kriteria**
 - b. Perbandingan antar Sub Kriteria**
 - c. Perbandingan Alternatif Kebijakan**
- 2. Foto – foto hasil penelitian**

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Disamping sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi di segala bidang, baik dalam bidang perikanan tangkap, perdagangan, industri pengolahan perikanan dan lain-lain terutama untuk masyarakat pesisir dan sekitarnya, pelabuhan perikanan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kegiatan ekonomi di wilayah belakang (*hinterland*) pelabuhan perikanan. Peningkatan aktivitas di pelabuhan akan meningkatkan efek ganda (*multiflyer effect*) terhadap sektor-sektor lainnya yang ada di sekitarnya, misalnya peningkatan perdagangan logistik kapal, jasa restoran, jasa perhotelan/penginapan, pemasaran hasil perikanan, serta kegiatan lain yang terkait.

Pada saat ini perkembangan pengelolaan pelabuhan perikanan menghadapi tantangan yang tidak kecil. Tantangan tersebut bersifat internasional, nasional maupun lokal. Pada tataran internasional, telah terjadi perubahan paradigma pembangunan perikanan yang lebih mengarah kepada pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud oleh *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF). Meski ketentuan tersebut tidak mengikat, karena Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia, maka hendaknya tidak mengabaikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam CCRF. Disamping itu, prinsip-prinsip pengelolaan perikanan pada CCRF tersebut, mengandung nilai-nilai keberlanjutan sumberdaya ikan dan usaha penangkapan ikan itu sendiri. Perhatian terhadap CCRF berimplikasi terhadap pengembangan pelabuhan perikanan nasional yaitu bahwa pengembangan tidak diarahkan untuk pengeksploitasian sumberdaya perikanan sebesar-besarnya, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab (*responsible*).

Pada tataran nasional, pengelolaan pelabuhan perikanan dihadapkan pada perubahan paradigma pembangunan dan tatanan politik dari sentralistik ke arah pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya UU no. 22 tahun 1999 yang direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU no. 25 tahun 1999 yang direvisi dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Perubahan ini berimplikasi terhadap pengembangan pelabuhan perikanan terutama dari pola kelembagaan

pengelola pelabuhan perikanan. Sedangkan dalam skala lokal pengelolaan pelabuhan perikanan menghadapi tantangan berupa karakteristik lokasi pelabuhan, persaingan dengan pelabuhan lain yang lebih maju, kelembagaan pengelolaan pelabuhan di tingkat daerah, hubungan dengan stakeholder, serta kondisi sosial budaya nelayan setempat.

Pada masa mendatang pengelolaan pelabuhan perikanan semakin dituntut lebih profesional untuk mendukung terselenggaranya usaha perikanan yang berdaya saing. Peran pelabuhan dalam mendukung usaha perikanan tentunya sejalan dengan Pasal 41 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyatakan bahwa pelabuhan perikanan mempunyai peranan penting dalam mendukung peningkatan produksi perikanan, memperlancar arus lalu lintas kapal perikanan, mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat perikanan, pelaksanaan dan pengendalian sumberdaya ikan, dan mempercepat pelayanan terhadap kegiatan di bidang usaha perikanan.

Saat ini Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan mengalami permasalahan masih rendahnya tingkat operasional pelabuhan, fasilitas pelabuhan belum berfungsi optimal, sumberdaya manusia (SDM), kelembagaan, serta penyelenggaraan pelelangan belum sesuai aturan. Selain itu ditemukan masalah lainnya yakni praktek penanganan ikan di pelabuhan yang belum sesuai, sanitasi dan higine lingkungan pelabuhan, dan pemukiman nelayan di lokasi pelabuhan yang masih belum tertata.

Pada sisi lain Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan sebagai salah satu pelabuhan perikanan terbesar di Provinsi Banten memiliki peran strategis untuk mendukung usaha perikanan, khususnya dalam hal penyediaan jasa kepelabuhanan. Dalam kaitan itu maka diperlukan sistem pengelolaan yang optimal. Namun demikian pola pengelolaan pelabuhan yang ada masih belum memenuhi ketentuan. Hal tersebut terkait dengan kelembagaan, ketersediaan fasilitas, tata operasional pelabuhan, serta pemenuhan aspek pengelolaan sumberdaya ikan dalam penyelenggaraan kepelabuhanan.

Secara kelembagaan suatu pelabuhan perikanan dikelola oleh otoritas pelabuhan perikanan (*fishing port authority*) yang memiliki kewenangan dalam mengelola operasional pelabuhan serta mengkoordinasikan instansi–instansi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pelabuhan perikanan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk melayani pengguna (*customer*) pelabuhan. Dalam hal ini keberhasilan penyelenggaraan pelabuhan sangat ditentukan

oleh peran otoritas pelabuhan serta lembaga–lembaga lain yang terkait dalam melaksanakan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan perikanan.

Dalam hal ketersediaan fasilitas, suatu pelabuhan perikanan diharuskan memiliki beberapa fasilitas pokok, fungsional dan penunjang sesuai dengan klasifikasi pelabuhan dimaksud dengan mengacu pada tingkat operasional pelabuhan perikanan.

Tata operasional pelabuhan berkenaan dengan aktivitas pelayanan pelabuhan sejak kedatangan kapal sampai dengan pemasaran hasil penangkapan yang dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Hal lainnya yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pelabuhan perikanan adalah menyangkut aspek pengelolaan sumberdaya ikan, khususnya terkait penerapan instrumen tertentu di pelabuhan untuk menjamin pemanfaatan sumberdaya ikan secara lestari dan berkelanjutan.

Beberapa hal di atas merupakan aspek–aspek operasional pelabuhan yang merupakan tuntutan pelayanan kepelabuhanan di Indonesia, termasuk di PPP Labuan. Oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut di atas, maka penelitian tentang Analisis Sistem Pengelolaan Pelabuhan Perikanan di PPP Labuan dianggap penting, agar diketahui secara pasti apakah sistem pengelolaan yang dilaksanakan di PPP Labuan telah memenuhi ketentuan yang ada, serta bagaimana merumuskan pola pengelolaan yang lebih baik dalam rangka peningkatan pengelolaan PPP Labuan. Penelitian ini merupakan langkah awal dalam rangka menciptakan sistem pengelolaan pelabuhan perikanan yang profesional di Provinsi Banten.

B. Perumusan Masalah

Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan merupakan salah satu pelabuhan perikanan terbesar di Provinsi Banten dengan tingkat operasional pelabuhan yang cukup tinggi. Namun demikian pengguna jasa kepelabuhanan masih mengeluhkan pelayanan yang belum memuaskan pada pelabuhan ini. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengelolaannya ada sub sistem yang tidak berfungsi optimal. Untuk mengetahui komponen mana yang tidak berfungsi optimal maka dilakukan analisis sistem yang ada secara keseluruhan.

C. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui kondisi aktual pengelolaan pelabuhan perikanan di PPP Labuan
- 2) Membandingkan sistem pengelolaan yang ada dengan kaidah-kaidah pengelolaan pelabuhan perikanan.
- 3) Menganalisis dan merekomendasikan alternatif sistem pengelolaan pelabuhan perikanan di PPP Labuan dalam rangka memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan secara maksimal

D. Kegunaan Penelitian

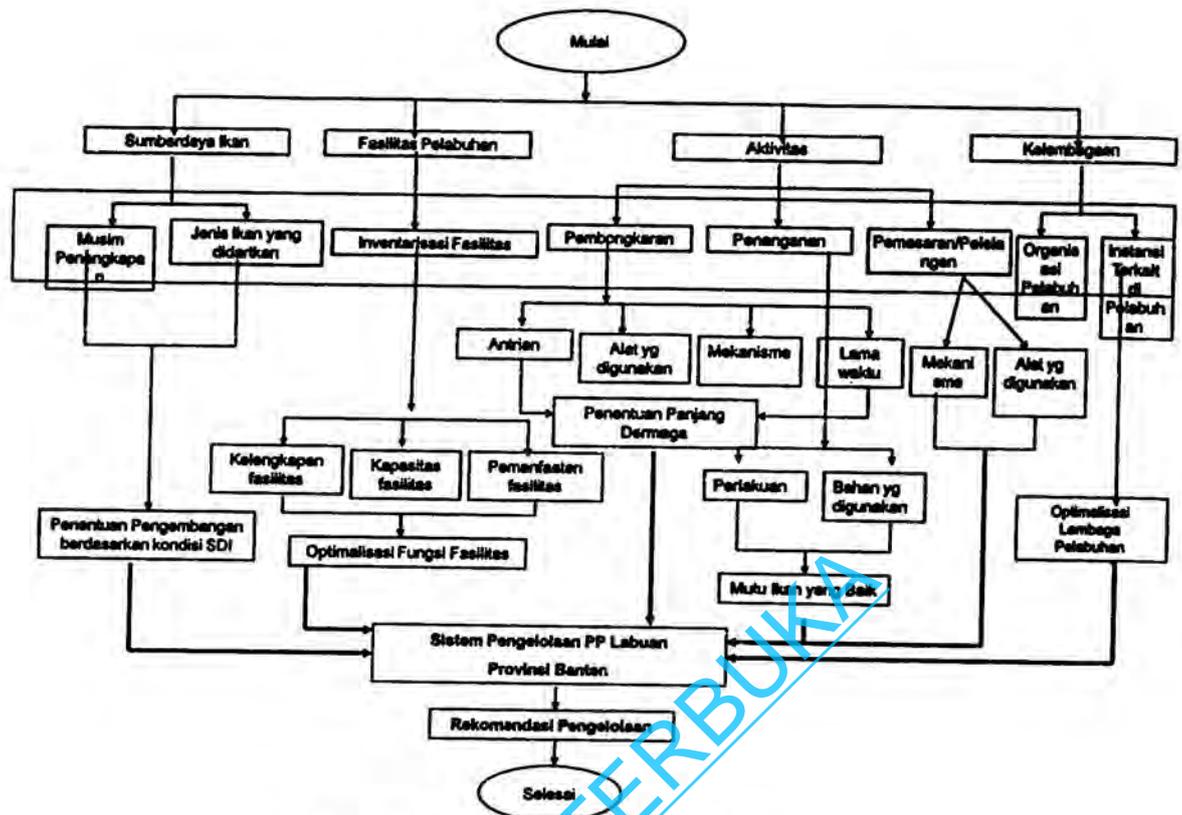
Bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Provinsi Banten khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka pengelolaan pelabuhan perikanan di PPP Labuan. Model analisis dari penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian pada lokasi pelabuhan lainnya di Banten. Bagi pengguna jasa pelabuhan atau masyarakat umum lainnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Kajian penelitian ini meliputi identifikasi fasilitas pelabuhan, aktivitas, kelembagaan dan struktur organisasi dalam pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan.

F. Kerangka Pemikiran

Fokus penelitian ini dilakukan pada level pengelola pelabuhan perikanan dengan melihat berbagai elemen pada sistem kepelabuhan perikanan. Elemen-elemen atau sub sistem dari sistem pelabuhan perikanan dimaksud meliputi meliputi aspek sumberdaya ikan, fasilitas, aktivitas dan kelembagaan pelabuhan perikanan. (Gambar 1.1)



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sistem dan Analisis Sistem

Pengertian dan definisi sistem pada berbagai bidang berbeda-beda, tetapi meskipun istilah *sistem* yang digunakan bervariasi, semua sistem pada bidang-bidang tersebut mempunyai beberapa persyaratan umum, yaitu sistem harus mempunyai elemen, lingkungan, interaksi antar elemen, interaksi antara elemen dengan lingkungannya, dan yang terpenting adalah sistem harus mempunyai tujuan yang akan dicapai.

Berdasarkan persyaratan ini, sistem dapat didefinisikan sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. Kumpulan elemen terdiri dari manusia, mesin, prosedur, dokumen, data atau elemen lain yang terorganisir dari elemen-elemen tersebut. Elemen sistem disamping berhubungan satu sama lain, juga berhubungan dengan lingkungannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Terdapat beberapa definisi sistem menurut para ahli. Davis (1984) mendefinisikan bahwa "Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud".

Sementara McLeod (2001) yang dikutip dari sumber yang sama menerangkan bahwa "Sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu".

Syahyuti (2008) menerangkan bahwa "sebuah sistem, adalah sebuah komposisi dari sejumlah elemen yang saling berinteraksi sehingga membentuk sebuah kesatuan yang padu (*a unified whole*)".

Lebih lanjut Syahyuti menjelaskan bahwa pada prinsipnya, setiap sistem selalu terdiri atas empat hal, yaitu: (1) Objek, yang dapat berupa bagian, elemen, ataupun variabel, dapat berupa benda fisik, abstrak, ataupun keduanya sekaligus; tergantung kepada sifat sistem tersebut; (2) Berisi atribut, yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya; (3) Memiliki hubungan internal di antara objek-objek di dalamnya; dan, (4) Sistem hidup dalam satu lingkungan tertentu.

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu (Anonim, 2007), yaitu: komponen-komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah, serta sasaran atau tujuan.

Komponen sistem atau elemen sistem dapat berupa: elemen-elemen yang lebih kecil yang disebut *sub sistem*, misalkan sistem komputer terdiri dari sub sistem perangkat keras, perangkat lunak dan manusia dan elemen-elemen yang lebih besar yang disebut *supra sistem*. Misalkan bila perangkat keras adalah sistem yang memiliki sub sistem CPU, perangkat I/O dan memori, maka supra sistem perangkat keras adalah sistem komputer.

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut.

Sementara Lingkungan dari sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan hal positif bagi sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedang lingkungan luar yang merugikan harus dikendalikan, kalau tidak akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem .

Penghubung merupakan media perantara antar subsistem. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Output dari satu subsistem akan menjadi input untuk subsistem yang lainnya dengan melalui penghubung. Dengan penghubung satu subsistem dapat berinteraksi dengan subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan.

Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa *maintenance input* dan *sinyal input*. *Maintenance input* adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. *Sinyal input* adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. Keluaran dari sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau kepada supra sistem.

Pengolah suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah akan merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi

akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa barang jadi.

Sedangkan sasaran atau tujuan suatu sistem merupakan hal lain yang juga cukup penting. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya.

Sementara analisis sistem dapat didefinisikan sebagai: "penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan", (Rohim, 2007).

Analisis sistem pada konteks manajemen didasarkan atas penentuan informasi yang terperinci yang dihasilkan setahap demi setahap dari proses, sehingga diketahui bagaimana sistem bekerja agar memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan, dengan membangun kriteria jalannya sistem agar mencapai optimasi. Dari proses identifikasi sistem dihasilkan spesifikasi yang terperinci tentang peubah yang menyangkut rancangan dan proses kontrol. Identifikasi sistem ditandai dengan adanya determinasi kriteria jalannya sistem yang akan membantu dalam evaluasi alternatif sistem. Kriteria tersebut meliputi pula penentuan output yang diharapkan, dan mungkin juga perhitungan rasio biaya dan manfaat, (Eriyanto, 2008).

Lebih lanjut (Rohim, 2007) menjelaskan bahwa tujuan Analisis Sistem adalah: mendefinisikan masalah secara tepat, menyusun alternatif penyelesaian, memilih dan mempertimbangkan satu dari alternatif tersebut, menyusun spesifikasi logis untuk penyelesaian tersebut, menyusun persyaratan fisik untuk penyelesaian tersebut, dan menyusun anggaran untuk fase desain sistem, *coding* dan implementasi sistem.

Untuk menganalisis sistem diperlukan langkah-langkah analisis sistem. Langkah-langkah di dalam tahap analisis sistem hampir sama dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam mendefinisikan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan di tahap perencanaan sistem. Perbedaannya pada analisis sistem ruang lingkup tugasnya lebih terinci.

Dalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang harus dilakukan dalam analisis sistem yaitu:

1. Mengidentifikasi masalah:

- Mengidentifikasi penyebab masalah
- Mengidentifikasi titik keputusan
- Mengidentifikasi personil-personil kunci

2. Memahami kerja dari sistem yang ada:

- Menentukan jenis penelitian
- Merencanakan jadwal penelitian
- Mengatur jadwal wawancara
- Mengatur jadwal observasi
- Mengatur jadwal pengambilan sampel
- Membuat penugasan penelitian
- Membuat agenda wawancara
- Mengumpulkan hasil penelitian

3. Menganalisis sistem:

- Menganalisis kelemahan sistem
- Menganalisis kebutuhan Informasi pemakai / manajemen

4. Membuat laporan hasil analisis, dengan tujuan:

- Pelaporan bahwa analisis telah selesai dilakukan
- Meluruskan kesalah-pengertian mengenai apa yang telah ditemukan dan dianalisis oleh analis sistem tetapi tidak sesuai menurut manajemen
- Meminta pendapat-pendapat dan saran-saran dari pihak manajemen
- Meminta persetujuan kepada pihak manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya.

B. Pengertian Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan Perikanan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 16 Tahun 2006 Pasal 1 merupakan "tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan

pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan”.

Pengertian pelabuhan perikanan di atas tentunya tidak lepas dari pengertian pelabuhan itu sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan yakni sebagai wilayah daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai kegiatan pemerintahan dan ekonomi yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang dengan dilengkapi fasilitas pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.

Lubis (2002) yang diacu dalam (Laga, 2005) menyatakan bahwa pelabuhan perikanan merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan ditinjau dari aspek produksi, pengolahan dan pemasaran baik berskala lokal, nasional maupun internasional.

Sementara Kusumastanto (2007) menjelaskan bahwa Pelabuhan merupakan pusat aktivitas perekonomian kelautan, sehingga keberadaannya sangat diperlukan dalam pembangunan kelautan.

Menurut Agoes (2003) jumlah pelabuhan perikanan di Indonesia mencapai \pm 540 unit, sementara pelabuhan khusus lainnya sebanyak \pm 1.414 dan pelabuhan umum \pm 728 unit. Kebanyakan pelabuhan khusus yang dimiliki telah memiliki fasilitas yang canggih yang dapat disiapkan pula untuk mendukung industri-industri di daerah sekitarnya.

C. Klasifikasi Pelabuhan dan Pelabuhan Perikanan

Dalam sistem kepelabuhanan di Indonesia, pelabuhan perikanan merupakan kategori pelabuhan khusus dimana penggunaannya khusus untuk kegiatan tertentu seperti kegiatan sektor perindustrian, pertambangan dan perikanan yang pembangunan dan pengoperasiannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan dan kegiatannya tidak tertampung di pelabuhan umum.

Secara umum pelabuhan dapat digolongkan kedalam beberapa jenis berdasarkan tipologi pelabuhan. Menurut Stbl 1936 No.700 yang diacu dalam Suryana (2000) bahwa kategori pelabuhan dibagi dua kriteria yakni pelabuhan laut dan pelabuhan pantai. Pelabuhan laut merupakan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang dapat dimasuki oleh kapal-kapal dari negara lain, sementara pelabuhan pantai adalah pelabuhan yang tidak terbuka

bagi perdagangan dengan luar negeri dan hanya dimasuki kapal berbendera Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001, pelabuhan dibedakan menjadi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Pelabuhan umum didefinisikan sebagai pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum, sedangkan pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

Berdasarkan letak geografisnya pelabuhan dapat dibedakan menjadi pelabuhan pantai dan pelabuhan sungai. Pelabuhan pantai merupakan pelabuhan yang terletak di pantai, sedangkan pelabuhan sungai adalah pelabuhan yang terletak di sungai biasanya agak jauh di pedalaman.

Tipologi pelabuhan berdasarkan kriteria besar kecilnya kegiatan dan kelengkapan fasilitasnya dapat dibagi menjadi: (1) pelabuhan internasional, (2) pelabuhan regional dan (3) pelabuhan lokal. Pelabuhan internasional adalah pelabuhan yang dapat menampung kapal-kapal luar negeri dan berukuran besar, sedangkan pelabuhan regional merupakan pelabuhan yang hanya disinggahi kapal dalam negeri/antar pulau dan pelabuhan lokal adalah pelabuhan yang banyak disinggahi kapal berukuran kecil seperti Perahu Layar Motor (PLM).

Berdasarkan komoditi perdagangan yang dimiliki, pelabuhan dapat dibedakan menjadi pelabuhan ekspor dan pelabuhan impor. Pelabuhan ekspor adalah pelabuhan dimana *cargo trafficnya* yang dominan merupakan barang ekspor, sedangkan pelabuhan impor adalah pelabuhan dimana *cargo trafficnya* yang dominan merupakan barang impor.

Sedangkan klasifikasi pelabuhan perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 16 Tahun 2006 khususnya pada Bab VII pasal 16 dibedakan menjadi 4 (empat) klas yakni: (1) Pelabuhan Perikanan Samudera, (2) Pelabuhan Perikanan Nusantara, (3) Pelabuhan Perikanan Pantai, dan (4) Pangkalan Pendaratan Ikan.

Faktor-faktor yang menyebabkan klasifikasi pelabuhan perikanan sebagaimana disebutkan di atas antara lain berkenaan dengan jumlah ikan yang didaratkan di suatu pelabuhan, kelengkapan fasilitas dan jumlah armada/kapasitas kapal yang masuk ke suatu pelabuhan perikanan.

Untuk dapat memperjelas klasifikasi pelabuhan perikanan dapat digambarkan secara matriks sebagai berikut:

Tabel 2.1. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

| No | Kriteria | Kelas Pelabuhan Perikanan | | | |
|----|--|--|--|--|---|
| | | Samudera | Nusantara | Pantai | PPI |
| 1. | Jangkauan operasi | Laut teritorial, ZEEI dan laut lepas | Laut teritorial dan ZEEI | Perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial | Perairan pedalaman dan perairan kepulauan |
| 2. | Kapasitas Kapal (Fasilitas Tambat Labuh) | ≥ 60 GT | ≥ 30 GT | ≥ 10 GT | ≥ 3 GT |
| 3. | Fasilitas pokok pelabuhan | Panjang dermaga minimal 300 m, kedalaman kolam minimal minus 3 m | Panjang dermaga minimal 150 m, kedalaman kolam minimal minus 3 m | Panjang dermaga minimal 100 m, kedalaman kolam minimal minus 2 m | Panjang dermaga minimal 50 m, kedalaman kolam minus 2 m |
| 4. | Daya dukung | 100 unit / 6.000 GT kapal perikanan sekaligus | 75 unit / 2.250 GT kapal perikanan sekaligus | 30 unit / 300 GT kapal perikanan sekaligus | 20 unit / 60 GT kapal perikanan sekaligus |
| 5. | Pemasaran | Lokal dan luar negeri (ekspor) | Lokal dan luar negeri (ekspor) | Lokal dan antar daerah | Lokal |
| 6. | Industri perikanan | terdapat industri perikanan | terdapat industri perikanan | - | - |

Sumber : Data diolah dari Permen KP No.16 Tahun 2006 tentang Pelabuhan Perikanan

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana diacu dalam Suryana (2000) mengungkapkan bahwa di Indonesia terdapat 2 (dua) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), 7 (tujuh) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), dan 21 (dua puluh satu) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). Penetapan klasifikasi terhadap pelabuhan-pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia dapat berubah sesuai dengan perkembangan pelabuhan perikanan masing-masing.

D. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pelabuhan Perikanan khususnya Pasal 11 menyebutkan bahwa Pelabuhan Perikanan yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota pengelolaannya dilakukan oleh UPT Pusat atau UPT Daerah. Sedangkan Pelabuhan Perikanan yang dimiliki oleh BUMN maupun perusahaan swasta, pengelolaannya dapat dilakukan sendiri atau diserahkan kepada pihak lain atas persetujuan Menteri.

Sehubungan dengan tugas pengelola pelabuhan, Pasal 12 disebutkan bahwa Pengelola Pelabuhan Perikanan bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas yang berada di Pelabuhan Perikanan. Tata cara pemeliharaan dan pertanggungjawaban pemeliharaan fasilitas selanjutnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13 menyatakan bahwa Pengelolaan pelabuhan perikanan yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan. Pengelolaan pelabuhan perikanan yang dimiliki oleh BUMN maupun perusahaan swasta dipimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan yang mendapat penetapan dari Direktur Jenderal. Kepala pelabuhan perikanan dapat diusulkan dari PNS oleh pemilik dengan persetujuan Direktur Jenderal. Kepala pelabuhan perikanan bertindak sebagai koordinator tunggal dalam penyelenggaraan pelabuhan perikanan. Dalam menata dan menertibkan penyelenggaraan pelabuhan perikanan, Kepala Pelabuhan Perikanan dapat menerbitkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelabuhan.

Pasal 14 menyatakan bahwa Penyelenggaraan fungsi pemerintahan pada pelabuhan Perikanan dikoordinasikan oleh kepala pelabuhan perikanan dengan berpedoman pada mekanisme tata hubungan kerja. Mekanisme tata hubungan kerja ditetapkan tersendiri oleh Menteri.

Pasal 15 menyatakan bahwa Pelabuhan perikanan yang dibangun oleh BUMN maupun perusahaan swasta wajib menerima petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengumpulan data, pengawasan dan keselamatan pelayaran .

Pelabuhan Perikanan biasanya diselenggarakan Kepala Pelabuhan yang berfungsi sebagai otoritas pelabuhan perikanan (*fishing port authority*). Otoritas pelabuhan berfungsi untuk mengkoordinasikan seluruh instansi/unit usaha yang ada di pelabuhan perikanan. Otoritas pelabuhan juga berhak mengatur regulasi penyelenggaraan pelabuhan perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten (2007) mengungkapkan beberapa prinsip pengelolaan pelabuhan perikanan sebagai berikut:

1. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Keberlanjutan dapat diartikan bahwa setiap kegiatan pelabuhan perikanan yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat kepada stakeholdernya (pemerintah, perusahaan swasta dan

masyarakat). Keberlanjutan pelayanan pelabuhan perikanan harus dilihat sebagai sistem yang terdiri dari prasarana dan sarana, operasi dan pemeliharaan, pengelolaan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar pelabuhan perikanan dapat berkelanjutan antara lain:

a. Keberlanjutan aspek pembiayaan

Keberlanjutan aspek pembiayaan mengandung pengertian bahwa pendapatan yang dihasilkan dari pelayanan/jasa fasilitas dan aktifitasnya disamping mampu untuk membiayai kembali kegiatan operasionalnya, juga memberikan keuntungan yang cukup signifikan. Sehingga pelabuhan perikanan tidak menjadi beban anggaran negara tetapi justru memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan negara.

b. Keberlanjutan aspek teknik

Keberlanjutan aspek teknik memberikan pengertian bahwa fasilitas-fasilitas yang dibangun harus layak secara teknik pembangunannya. Fasilitas-fasilitas tersebut mempunyai umur operasional dan kesesuaian dengan rencana yang dibuat sebelumnya.

c. Keberlanjutan operasional

Pelabuhan perikanan harus memenuhi target-target pencapaian operasional tertentu pada selang waktu tertentu sesuai dengan klasifikasi dan kriteria pelabuhan perikanan tersebut. Tingkat operasional yang dimaksud diantaranya adalah: jumlah produksi hasil tangkapan yang didaratkan, jumlah kapal yang berkunjung dan atau mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan, jumlah kebutuhan melaut (bahan bakar minyak, es dan air tawar) yang disalurkan, peningkatan pemanfaatan kawasan industri yang tercermin dari jumlah perusahaan yang beroperasi di pelabuhan perikanan tersebut, dan lain-lain.

d. Keberlanjutan aspek lingkungan hidup

Adanya pelabuhan perikanan di suatu wilayah sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kualitas dan keseimbangan lingkungan yang ada. Kualitas lingkungan yang diperkirakan akan terpengaruh diantaranya adalah aspek fisika dan kimia lingkungan (iklim, kualitas udara, hidrologi, hidrooseanografi, tanah dan lahan), aspek-aspek biologi lingkungan (kualitas dan kuantitas biota darat dan biota perairan) dan aspek-aspek sosial ekonomi lingkungan (mata pencaharian, kependudukan, transportasi, ketertiban masyarakat, dll). Namun demikian, dampak

negatif dari pengoperasian pelabuhan perikanan tersebut diupayakan seminimal mungkin, sebaliknya dampak positif yang perlu terus dikembangkan.

e. Keberlanjutan aspek kelembagaan

Kelembagaan pengelola pelabuhan perikanan diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugas operasional pelabuhan perikanan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan operasional pelabuhan perikanan dan tuntutan masyarakat pengguna.

f. Keberlanjutan sosial

Keberadaan pelabuhan perikanan dapat diterima oleh masyarakat dimana pelabuhan perikanan tersebut berada. Hal ini diharapkan dapat berimplikasi pada tingkat partisipasi masyarakat dalam aktifitas-aktifitas kepelabuhanan. Keberlanjutan sosial dapat dilihat dari minimnya jumlah konflik antar kelompok masyarakat akibat adanya pelabuhan perikanan dan aktivitasnya.

2. Penggunaan Efektif dan Efisien

Penggunaan prasarana dan sarana pelabuhan perikanan dikatakan efektif apabila prasarana dan sarana yang tersedia tepat tujuan, tepat sasaran, dan layak dipergunakan dilihat dari aspek teknis, aspek kelembagaan, aspek pengembangan kapasitas dan perubahan perilaku masyarakat pengguna.

Tepat tujuan mengandung pengertian bahwa prasarana pelabuhan perikanan dapat berfungsi sebagaimana yang dituntut oleh UU no 9 tahun 1985 tentang perikanan. Penjelasan UU tersebut mengatakan bahwa pelabuhan perikanan tersebut berfungsi sebagai sarana penunjang untuk meningkatkan produksi dan sesuai dengan sifatnya sebagai satu lingkungan kerja. Fungsi pelabuhan perikanan meliputi berbagai aspek yaitu sebagai pusat pengembangan masyarakat, tempat berlabuh kapal perikanan, tempat pendaratan hasil tangkapan, tempat untuk memperlancar kegiatan-kegiatan kapal perikanan, pusat pemasaran dan distribusi hasil tangkapan, pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan serta pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data.

Tepat sasaran mengandung pengertian bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna. Masyarakat pengguna pelabuhan perikanan mencakup nelayan, pedagang, pengusaha, pihak pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan

dengan pelayanan pelabuhan perikanan. Diharapkan dengan adanya pelabuhan perikanan, masyarakat perikanan mendapatkan nilai lebih dari kegiatan di pelabuhan perikanan.

Layak dipergunakan mengandung pengertian bahwa prasarana pelabuhan perikanan disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna baik jumlah, kualitas dan kapasitasnya. Prasarana yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan berakibat pada kemubaziran karena fasilitas tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya atau bahkan sebaliknya fasilitas tersebut mengalami over capacity sehingga menimbulkan hambatan dalam kelancaran operasional pelabuhan perikanan. Ketepatan perencanaan merupakan salah satu kunci layaknya prasarana pelabuhan perikanan secara teknis.

Layak secara kelembagaan mengandung pengertian bahwa prasarana pelabuhan perikanan tersebut masih dalam jangkauan pengelolaan, artinya bahwa secara kelembagaan dan sumberdaya manusia, institusi pelabuhan perikanan mampu mengelola aktifitas dan fasilitas pelabuhan perikanan.

Disamping itu, pemanfaatan fasilitas-fasilitas di pelabuhan perikanan harus mampu meningkatkan kapasitas dan perubahan perilaku masyarakat. Salah satu fungsi pelabuhan perikanan dalam UU yang telah dijelaskan di atas adalah sebagai pusat pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat mengandung arti bahwa terjadi peningkatan kemandirian dan posisi tawar masyarakat nelayan dalam menentukan kehidupannya dan peningkatan tingkat partisipasi masyarakat nelayan dalam aktifitas-aktifitas kepelabuhanan yang sebenarnya akan menguntungkan bagi mereka sendiri. Disamping itu, aktifitas pelabuhan perikanan juga diharapkan mampu meningkatkan penguasaan teknologi penangkapan dan penguasaan informasi (informasi pasar, informasi daerah penangkapan) sehingga mereka mampu meningkatkan produktifitas dalam usaha penangkapan ikan.

3. Kemudahan Akses (*Accesibility*)

Pelabuhan perikanan merupakan salah satu lembaga pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu tingkat keberhasilan pelabuhan perikanan dapat diukur dengan kemudahan masyarakat pengguna terhadap berbagai fasilitas dan layanan yang diberikan pelabuhan perikanan. Pengertian kemudahan akses juga mencakup tingkat kepuasan masyarakat pengguna terhadap fasilitas dan pelayanan manajemen pelabuhan perikanan.

4. Kesetaraan (*Equity*)

Kesetaraan berkaitan dengan suatu kondisi bahwa prasarana pelabuhan perikanan bermanfaat bagi setiap anggota masyarakat pengguna tanpa membedakan strata sosial, suku, agama, dan ras maupun daerah asal. Pelabuhan perikanan diperuntukkan bagi semua pelaku yang bergerak di dunia perikanan. Mekanisme pasar dan keunggulan fasilitas dan pelayanan yang diberikan pihak pelabuhan perikanan merupakan daya tarik yang menyebabkan nelayan dan para pengguna lainnya untuk beraktifitas di pelabuhan perikanan tersebut termasuk juga dengan para pelaku perikanan dari luar wilayah pelabuhan perikanan, meskipun memerlukan pengaturan tertentu seperti pengaturan keimigrasian dan kepabeanan bagi nelayan-nelayan yang dari luar negeri maupun pengaturan bagi nelayan andon (nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut dengan daerah penangkapan yang berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan, berbasis sementara waktu atau dalam waktu yang relatif lama di pelabuhan perikanan di luar daerah asal nelayan tersebut).

5. Kepuasan Pengguna (*Customer satisfaction*)

Pada awalnya konsep kepuasan pengguna diterapkan di perusahaan-perusahaan swasta dimana pengguna merupakan inti dari adanya suatu perusahaan. Namun demikian, konsep ini kemudian juga dapat dikembangkan untuk lembaga-lembaga pemerintah.

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja suatu produk dan harapan-harapannya (Kotler, 2002). Kepuasan merupakan evaluasi purna pembelian suatu barang atau jasa. Berdasarkan definisi yang ada berarti kepuasan merupakan fungsi dari kesan akan kinerja dan harapan. Bila kinerja suatu produk lebih tinggi dibanding harapan berarti pelanggan merasa puas, atau sebaliknya.

Faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen adalah mutu produk dan pelayanannya, kegiatan penjualan, pelayanan setelah penjualan, dan nilai perusahaan. Kegiatan penjualan terdiri atas variabel pesan sebagai penghasil serangkaian sikap tertentu mengenai perusahaan, produk, dan tingkat kepuasan yang diharapkan konsumen; variabel sikap sebagai penilaian konsumen atas pelayanan perusahaan; dan variabel perantara sebagai penilaian konsumen terhadap perantara perusahaan seperti agen.

Berbagai cara dilakukan perusahaan untuk membentuk harapan pelanggan, seperti promosi, sikap pegawai yang baik, unjuk kerja penjualan yang profesional, menyulitkan pelanggan untuk mengganti pemasok, dan memberi kepuasan yang tinggi. Hal ini membuktikan pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, tanggap, efisien dan efektif terutama bagi pelayanan publik.

Dalam konteks pelabuhan perikanan yang dimaksud dengan pengguna adalah para pihak yang terlibat/beraktifitas di pelabuhan perikanan seperti nelayan, pedagang, pengolah dan lain-lain. Sedangkan produk yang diberikan berupa jasa pelayanan mulai pra penangkapan (penyediaan kebutuhan melaut), penangkapan (kemudahan, keamanan dan kenyamanan bongkar muat hasil tangkapan), perbaikan, pengolahan dan pemasaran. Kepuasan pengguna perlu senantiasa dipantau dan diukur untuk melihat sejauh mana efektifitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan pengelola pelabuhan perikanan.

E. Fasilitas Pelabuhan

Fasilitas Pelabuhan Perikanan adalah sarana dan prasarana yang tersedia di Pelabuhan Perikanan untuk mendukung operasional pelabuhan (*Permen KP 16/2006 tentang Pelabuhan Perikanan*)

Fasilitas yang dimiliki oleh suatu pelabuhan perikanan pada umumnya akan menentukan skala atau tipe dari suatu pelabuhan dan berkaitan pula dengan skala usaha perikananannya. Jenis dan kapasitas yang ada berkembang sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan.

Keterkaitan ketersediaan fasilitas pelabuhan dengan skala atau tipe pelabuhan perikanan khususnya berkaitan dengan kapasitas tambat labuh kapal, panjang dermaga, kedalaman kolam pelabuhan, serta ketersediaan industri perikanan.

Fasilitas pelabuhan perikanan dapat dikelompokkan menjadi: fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.

1. Fasilitas Pokok

Fasilitas pokok atau disebut juga fasilitas dasar adalah fasilitas pelabuhan yang diperlukan dalam kegiatan suatu pelabuhan perikanan. Fasilitas pokok ini berfungsi untuk menjamin terselenggaranya kegiatan kepelabuhanan dengan baik serta melindungi kegiatan di

pelabuhan dari gangguan alam (gelombang, arus, angin, pengendapan lumpur/pasir). Fasilitas pokok sekurang-kurangnya meliputi: fasilitas pelindung seperti breakwater, revetment, dan groin dalam hal secara teknis diperlukan; fasilitas tambat seperti dermaga dan jetty; perairan seperti kolam dan alur pelayaran, penghubung seperti jalan, drainase, gorong-gorong, jembatan, serta lahan pelabuhan perikanan.

2. Fasilitas Fungsional

Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang berfungsi memberikan pelayanan yang diperlukan. Fasilitas ini sekurang-kurangnya meliputi: fasilitas pemasaran hasil perikanan seperti tempat pelelangan ikan (TPI), navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, SSB, rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas; suplai air bersih, es dan listrik; pemeliharaan kapal dan alat penangkap ikan seperti dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti transit sheed dan laboratorium pembinaan mutu; perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan; transportasi seperti alat-alat angkut ikan dan es; dan pengolahan limbah seperti IPAL.

3. Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang atau disebut juga fasilitas tambahan merupakan fasilitas yang secara tidak langsung dapat menunjang kegiatan atau fungsi pelabuhan perikanan, misalnya fasilitas pembinaan nelayan seperti balai pertemuan nelayan; fasilitas pengelola pelabuhan seperti mess operator, pos jaga, dan pos pelayanan terpadu; fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan MCK; kios IPTEK; dan fasilitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan (keselamatan pelayaran, kebersihan, keamanan dan ketertiban, bea dan cukai, keimigrasian, pengawas perikanan, kesehatan masyarakat, dan karantina ikan).

F. Kelembagaan

Aspek kelembagaan pelabuhan merupakan salah satu kunci sukses pelayanan kepelabuhanan. Dalam suatu pelabuhan perikanan biasanya dikelola oleh otoritas pelabuhan perikanan (*fishing port authority*) atau biasa disebut dengan organisasi pelabuhan.

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang organisasi pelabuhan adalah Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 02 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan

Dalam Permen dimaksud, organisasi pelabuhan perikanan berfungsi untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat perikanan dan menunjang optimalisasi produksi perikanan serta pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab.

Dalam suatu pelabuhan perikanan terdapat beberapa instansi dan lembaga terkait yang keberadaannya diperlukan untuk mendukung terlaksananya fungsi pelabuhan secara optimal. Lembaga-lembaga terkait tersebut serta fungsinya masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Lembaga Terkait di Pelabuhan Perikanan

| No | Lembaga | Fungsi |
|-----|---|---|
| 1. | Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan | <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan fasilitas - Perijinan (penggunaan lahan fasilitas, dll) - Pengaturan dan koordinasi kegiatan di PP - Pengamanan dan ketertiban - Pengumpulan/pengolahan data |
| 2. | Syahbandar | <ul style="list-style-type: none"> - Perijinan (SIB, Pas Biru, dll) - Pengawasan keselamatan kapal |
| 3. | Imigrasi | <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan ABK yang keluar masuk wilayah RI |
| 4. | Bea Cukai | <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen keimigrasian |
| 5. | Kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan pabean (barang keluar/masuk wilayah RI) - Pengawasan/penanganan kesehatan ABK - Fumigasi kapal |
| 6. | Satpol Air | <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan, penyidikan dan penanggulangan kriminalitas |
| 7. | Dinas Perikanan | <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan teknis penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran - Perijinan |
| 8. | BUMN | <ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan/pemeliharaan fasilitas komersial - Pengolahan/pemasaran - Pengembangan fasilitas - Pengelolaan lahan milik PERUM |
| 9. | Koperasi | <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan pelelangan ikan - Penyediaan bahan perbekalan |
| 10. | Swasta/Pengusaha | <ul style="list-style-type: none"> - Sarana perbekalan (KSO/U) - Penangkapan, pengolahan dan pemasaran - Pemeliharaan fasilitas |
| 11. | Organisasi Masyarakat/Profesi | <ul style="list-style-type: none"> - Wadah penyaluran aspirasi - Mitra usaha, dll |

Sumber : Lubis dalam Laga (2005)

Kelembagaan pelabuhan perikanan yang terdiri dari berbagai instansi merupakan satu kesatuan yang saling menunjang untuk kelancaran operasional pelabuhan. Optimalnya pelaksanaan fungsi lembaga kepelabuhanan ini akan mempengaruhi kinerja operasional pelabuhan dimaksud.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk melakukan analisis sistem pengelolaan pelabuhan perikanan secara efektif dan efisien berdasarkan data-data dan informasi yang ada di lapangan. Dalam hal ini efektifitas sistem pengelolaan merupakan perbandingan antara model sistem yang disusun dengan realita yang ada.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 20 nelayan dengan kapal yang berbeda, 10 pedagang/bakul, 10 konsumen yang dipilih secara acak, dan 5 orang pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan dengan cara pengisian kuisioner.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dilakukan sebagaimana digambarkan dalam tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1. Instrumen Penelitian

| Variabel Penelitian | Indikator | Metodologi | Instrumen |
|----------------------------|--|--|---|
| Pendekatan Sistem | - Analisis Kebutuhan - Formulasi Permasalahan - Identifikasi Sistem | Analisis sistem | 3 item pendekatan sistem |
| Sub Sistem Sumberdaya Ikan | - Musim ikan - Jenis ikan yang didaratkan | Deskripsi pola musim penangkapan ikan | Wawancara dengan nelayan untuk pengisian tabel perkiraan pola musim penangkapan |
| Sub Sistem Fasilitas | - Panjang dermaga - Luas kolam pelabuhan - Kedalaman kolam pelabuhan - Luas gedung pelelangan | Persamaan (Ditjen Perikanan Tangkap, Laga,2001) tentang Penentuan Proporsi Fasilitas Pelabuhan | Hasil perhitungan aspek fasilitas |
| Sub Sistem Aktivitas | - Penanganan ikan dari pembongkaran sampai di TPI - Perbandingan antara berat es dengan berat | Deskripsi berdasarkan hasil pengamatan langsung dan | 12 item wawancara |

| Variabel Penelitian | Indikator | Metodologi | Instrumen |
|---|---|---|--|
| | berat es dengan berat ikan - Lama pembongkaran - Wadah/keranjang yang digunakan | wawancara | |
| Sub Sistem Kelembagaan | - Lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan pelabuhan perikanan - Peran yang dikehendaki - Analisis peraturan perundang-undangan | - Analisis stakeholder - Analisis peraturan perundang – undangan | - Matrikulasi lembaga terkait dan peran yang dikehendaki - Identifikasi dan pemetaan peraturan perundang – undangan yang dibutuhkan dalam pengelolaan pelabuhan |
| Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan | - Aspek Sumberdaya ikan - Aspek Sosial - Aspek Ekonomi Daerah - Aspek Infrastruktur (Fasilitas) - Aspek Kelembagaan | AHP | <i>Expert Choice</i> |

Sedangkan kisi – kisi instrumen secara lengkap disajikan dalam lampiran laporan penelitian ini.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Pencarian dan pengumpulan data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui survey langsung ke lapangan, wawancara dan pengisian kuisioner. Data primer yang dikumpulkan terkait aspek–aspek dalam sistem pengelolaan pelabuhan perikanan, meliputi: nelayan, pengelola pelabuhan, pemerintah daerah, pengelola TPI, pedagang, serta instansi lain yang terkait langsung di pelabuhan perikanan.

Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan cara mendatangi instansi–instansi yang terkait antara lain berupa hasil kajian yang telah dilakukan, laporan statistik, laporan tahunan dinas, laporan operasional pelabuhan perikanan, dan data lainnya yang terkait.

E. Metode Analisis Data

1. Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem merupakan suatu metodologi pemecahan masalah yang diawali dengan analisa kebutuhan, formulasi permasalahan, dan identifikasi sistem.

a. Analisis kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelaku-pelaku yang terlibat dalam sistem. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan sistem pelabuhan perikanan di PPP Labuan meliputi: nelayan, pedagang, konsumen, penyelenggara TPI, pengelola pelabuhan (otoritas pelabuhan perikanan), Pemerintah Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan), koperasi perikanan, syahbandar, kesehatan pelabuhan, dan organisasi nelayan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).

b. Formulasi permasalahan

Berdasarkan analisis kebutuhan dapat diformulasikan permasalahan dalam sistem pelabuhan perikanan. Informasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelabuhan perikanan didapatkan melalui studi pustaka serta wawancara dengan nelayan dan pihak terkait lainnya.

c. Identifikasi Sistem

Proses identifikasi sistem menghasilkan spesifikasi yang terperinci tentang peubah yang menyangkut rancangan dan proses kontrol. Identifikasi sistem ditandai dengan adanya determinasi kriteria jalannya sistem yang akan membantu dalam evaluasi alternatif sistem. Kriteria tersebut meliputi pula penentuan output yang diharapkan, dan mungkin juga perhitungan rasio biaya dan manfaat.

Identifikasi sistem pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan dilakukan untuk mengidentifikasi keterkaitan dari masing-masing komponen sistem kepelabuhanan.

2. Analisis Sub Sistem Sumberdaya Ikan

Pada tahap ini akan digambarkan secara deskriptif kondisi sumberdaya ikan di Pelabuhan Perikanan Labuan yang meliputi musim penangkapan dan jenis ikan yang didaratkan. Hal ini dianggap penting sebagai bahan informasi pengelolaan pelabuhan perikanan. Deskripsi kondisi sumberdaya ikan didasarkan pada hasil pengamatan langsung atau disarikan dari sumber pustaka hasil penelitian terdahulu.

3. Analisis Sub Sistem Fasilitas

Analisis terhadap fasilitas dilakukan dengan menggunakan persamaan (Ditjen Perikanan Tangkap,2001). Rumus-rumus perhitungan kapasitas fasilitas pelabuhan perikanan antara lain:

a. Panjang Dermaga

$$L = \frac{(l + s) \times n \times a \times h}{u \times d}$$

dimana :

- L = Panjang dermaga (m)
- l = Panjang kapal (m)
- s = Jarak antar kapal (m)
- n = Jumlah kapal yang memakai dermaga (unit)
- a = Berat kapal (Ton)
- h = Lama kapal di dermaga (Jam)
- u = Produksi per hari
- d = Lama *fishing trip* (Jam)

b. Luas Kolam Pelabuhan

$$L = Lt + (3 \times n \times l \times b)$$

dimana :

- L = Luas kolam pelabuhan
- Lt = Luas untuk memutar kapal (m²) = $\pi \times r^2$
- n = Jumlah kapal maksimal yang berlabuh (unit)
- l = Panjang kapal (meter)
- b = Lebar kapal (meter)

c. Kedalaman Kolam Pelabuhan

$$D = d + \frac{1}{2} H + S + C$$

dimana :

- D = Kedalaman perairan (cm)
 d = Draft kapal terbesar dengan muatan penuh (cm)
 H = Tinggi gelombang maksimal (50 cm)
 S = Tinggi anggukan kapal yang melaju (10 – 30 cm)
 C = Jarak aman dari lunas kapal ke dasar perairan (25 – 100 cm)

d. Luas Gedung Pelelangan

$$S = \frac{N \times P}{R \times \alpha}$$

dimana :

- S = Luas gedung pelelangan (m²)
 N = Jumlah produksi ikan yang dilelang per hari (ton)
 P = Daya tampung produksi (m²/ton)
 R = Intensitas lelang (1 – 2 kali per hari)
 α = Perbandingan ruang lelang dengan gedung lelang (0,27 – 0,394), atau tergantung pada luas tempat pelelangan ikan

Flow chart fasilitas adalah: potensi sumberdaya ikan yang ada → pelaku yang terkait → luas lahan dan yang tersedia → bentuk fasilitas yang dibangun → kapasitas dan kelengkapan fasilitas.

4. Analisis Sub Sistem Aktivitas

Analisis terhadap sub sistem aktifitas di pelabuhan perikanan adalah dengan memperhatikan prinsip-prinsip selama penanganan ikan dari pembongkaran sampai pengangkutan ke tempat pelelangan ikan (TPI) dengan kriteria yang dinyatakan oleh Junianto (2003) sebagai aspek manajemen sebagai berikut:

- a. Kontrol suhu ikan selama penanganan agar selalu dingin
- b. Lakukan penanganan dengan cepat dan tepat
- c. Perkecil sentuhan langsung dengan ikan
- d. Hindari sengatan langsung matahari pada tubuh ikan
- e. Perkecil terjadinya kontaminasi terhadap ikan

Disamping kriteria tersebut di atas juga dianalisis terhadap perbandingan antara berat es dengan berat ikan, lama pembongkaran, wadah/keranjang yang digunakan dalam mengangkat ikan dan lantai tempat pelelangan berlangsung.

Flow chart aktivitas adalah: hasil tangkapan → sortir → diangkat ke TPI → lelang → dikemas → transportasi → pemasaran.

5. Analisis Sub Sistem Kelembagaan

Analisis peran lembaga kepelabuhanan dilakukan untuk meningkatkan optimalisasi lembaga kepelabuhanan. Dalam hal ini digunakan metode analisis *stakeholder* dengan cara menyusun matrikulasi peran masing-masing lembaga yang terkait serta merumuskan peran yang dikehendaki untuk meningkatkan fungsi lembaga dimaksud. Hal ini sesuai dengan metode analisis kelembagaan dalam Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten (2007).

Selain itu dilakukan analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pelabuhan perikanan, dalam hal ini dilakukan identifikasi dan pemetaan peraturan yang mendukung penyelenggaraan pelabuhan perikanan.

6. Analisis Kebijakan Pengembangan PPP Labuan

Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP), yaitu suatu pendekatan yang digunakan berdasarkan analisis kebijakan yang bertujuan untuk memecahkan konflik yang terjadi sehingga mendapatkan lokasi yang tepat dan optimal bagi pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan (*sustainable*).

Dalam AHP, penetapan prioritas kebijakan dilakukan dengan menangkap secara rasional persepsi orang, kemudian mengkonversi factor-faktor yang *intangibile* (yang tidak terukur) kedalam ukuran yang biasa, sehingga dapat dibandingkan. Adapun tahapan/langkah-langkah dalam analisis data menurut Saaty (1993) dan Suryadi (1998) adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi Sistem

Identikasi sistem dilakukan dengan cara mempelajari beberapa rujukan untuk memperkaya ide atau berdiskusi dengan para pakar atau orang yang menguasai permasalahan untuk mendapatkan konsep yang relevan dengan permasalahan dan mendefinisikan masalah serta mendapatkan solusi yang diinginkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan menggunakan PHA dalam kerangka manfaat dan biaya. Pemecahan masalah dan solusi yang diinginkan yaitu mendapatkan skenario yang efisien dari kebijakan, maka untuk menyusun suatu analisis yang mengaplikasikan dua metode pendekatan tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan.

b. Penyusunan Hirarki

Dalam penyusunan hirarki atau struktur keputusan dilakukan dengan mengelompokkan elemen-elemen system atau alternatif keputusan kedalam suatu abstraksi sistem hirarki keputusan.

c. Komparasi Berpasangan

Penentuan tingkat kepentingan pada setiap tingkat hirarki atas pendapat dilakukan dengan teknik komparasi berpasangan (*pairwise comparison*). Teknik komparasi berpasangan yang digunakan dalam PHA dilakukan dengan cara membandingkan antara elemen satu dengan elemen yang lainnya dalam satu tingkat hirarki secara berpasangan sehingga diperoleh nilai kepentingan dari masing-masing elemen. Penilaian dilakukan dengan memberikan bobot (angka) pada setiap elemen yang dibandingkan dengan hasil wawancara langsung dengan responden. Responden bisa seorang ahli atau bukan, tetapi terlibat dan mengetahui permasalahan tersebut.

d. Matrik Pendapat Individu

Formulasi matrik individu adalah sebagai berikut :

$$A=(a_{ij})= \begin{array}{c|cccc} C1 & C2 & \dots & \dots & Cn \\ \hline & C1 & 1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ & C2 & 1/a_{21} & 1 & \dots & a_{2n} \\ & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ & Cn & a_{n1} & a_{n2} & \dots & 1 \end{array}$$

Dalam hal ini C_1, C_2, \dots, C_n adalah set elemen pada setiap tingkat keputusan dalam hirarki. Kuantifikasi pendapat dari hasil komparasi berpasangan membentuk matrik $n \times n$. Nilai a_{ij} merupakan nilai matrik pendapat hasil komparasi yang mencerminkan nilai kepentingan C_i terhadap C_j .

e. Matrik Pendapat Gabungan

Matrik pendapat gabungan merupakan matrik baru yang elemen-elemennya (g_{ij}) berasal dari rata-rata geometrik elemen matrik pendapat individu yang nilai ratio konsistensinya (CR) memenuhi syarat. Tujuan dari penyusunan matrik pendapat gabungan ini adalah untuk membentuk suatu matrik yang mewakili matrik-matrik pendapat individu yang ada. Matrik ini selanjutnya digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi serta vektor prioritas dari elemen-elemen hierarki yang mewakili semua responden.

f. Pengolahan Horisontal

Pengolahan horizontal digunakan untuk menyusun prioritas elemen keputusan pada hirarki keputusan dengan empat tahapan Perkalian baris (z), Perhitungan vektor prioritas atau vektor ciri, Perhitungan nilai Eigen maksimum (E_{max}) dan Perhitungan Indeks Konsistensi (CI).

g. Pengolahan Vertikal

Pengolahan vertikal digunakan untuk menyusun prioritas pengaruh setiap elemen pada tingkat hirarki keputusan terhadap sasaran utama. Jika C_{vij} didefinisikan sebagai nilai prioritas pengaruh elemen ke- i pada tingkat ke- j terhadap sasaran utama.

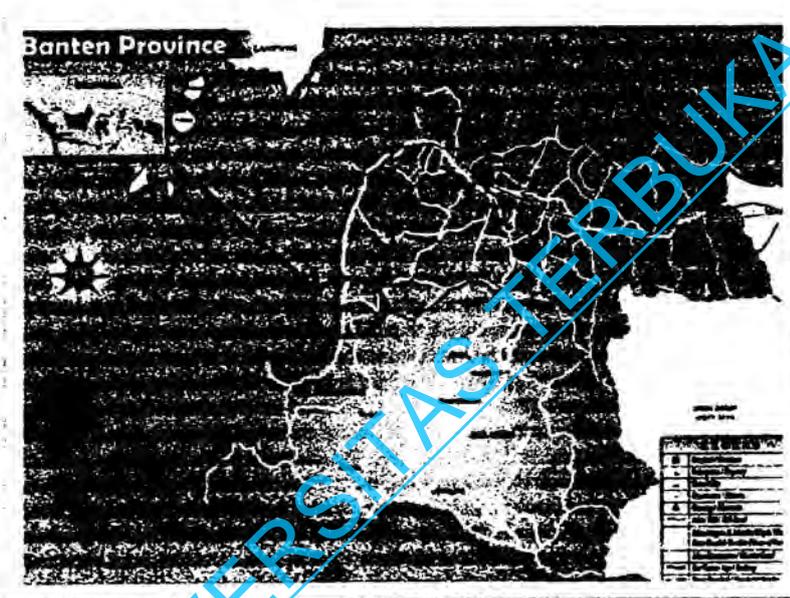
h. Revisi Pendapat

Revisi pendapat dapat dilakukan apabila nilai konsistensi ratio (CR) pendapat cukup tinggi (lebih besar dari 0,1), dengan mencari deviasi RMS (*Root Mean Square*) dari baris-baris (a_{ij}) dan perbandingan nilai bobot baris terhadap bobot kolom (w_i/w_j) dan merevisi pendapat pada baris yang mempunyai nilai terbesar. Beberapa ahli berpendapat jika jumlah revisi terlalu besar, sebaiknya responden tersebut dihilangkan, Jadi penggunaan revisi ini sangat terbatas mengingat akan terjadinya penyimpangan dari jawaban yang sebenarnya.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Geografis

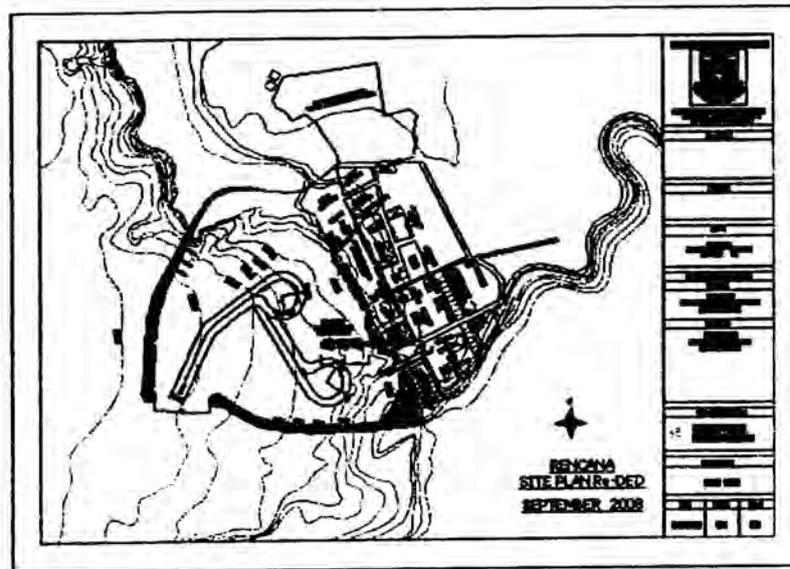
Secara geografis Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan berada di Desa Teluk Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang - Provinsi Banten. Posisi PPP Labuan berada pada wilayah perairan Selat Sunda yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (ALKI - 1). Berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia, lokasi PPP Labuan berada pada wilayah WPP 3.



Gambar 4.1. Lokasi PPP Labuan

Lokasi PPP Labuan berada pada titik koordinat $06^{\circ} 24' 30''$ LS dan $105^{\circ} 49' 15''$ BT. Jarak lokasi PPP dengan ibukota provinsi sekitar 64 km, sedangkan dari ibu kota kabupaten berjarak 42 km dengan kondisi jalan yang cukup baik. PPP ini mulai dibangun sejak tahun 1995.

PPP Labuan memiliki potensi pengembangan yang cukup prospektif karena menghadap wilayah perairan yang kaya potensi sumberdaya ikan, yakni Selat Sunda dan Samudera Indonesia. Potensi sumberdaya ikan dan usaha penangkapan ikan di wilayah



Gambar 4.2. Desain Pengembangan PPP Labuan

ini diperkirakan mencapai 92.917,7 ton dan baru dimanfaatkan sebanyak 29.426 ton (31,17 %) dengan kontribusi dari TPI Labuan sebesar 11.117,6 ton. (Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang, 2002).

Seperti diketahui perairan Selat Sunda merupakan daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) yang cukup potensial. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kapal-kapal yang beroperasi menangkap ikan di Selat Sunda, termasuk dari wilayah lain seperti Jawa Tengah dan Sumatera. Pada musim tertentu kapal-kapal dimaksud mendaratkan ikannya di PPP Labuan.

B. Prasarana Pelabuhan

Fasilitas pokok yang dimiliki PPP Labuan hingga saat ini dapat diuraikan menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

1. Fasilitas Pokok

a. Fasilitas Pelindung

Fasilitas pelindung yang dimiliki berupa breakwater yang berfungsi sebagai penahan gelombang. Panjang breakwater yang sudah dibangun sampai dengan tahun 2006 adalah : breakwater sisi kiri sepanjang 213,5 m dan breakwater sisi kanan sepanjang 420 m.

b. Fasilitas Tambat

Fasilitas tambat berupa dermaga sepanjang 350 meter yang digunakan sebagai tempat bongkar muat hasil tangkapan serta tempat bertambatnya kapal.

c. Fasilitas Perairan (Kolam Pelabuhan dan Alur)

Kolam pelabuhan di PPP Labuan berukuran $\pm 200 \text{ m} \times 400 \text{ m}$. Pada wilayah kolam pelabuhan ini direncanakan akan dilakukan pengerukan/pendalaman seluas 8,55 hektare dengan kedalaman yang memungkinkan kapal berukuran sampai dengan 50 GT dapat masuk ke kolam pelabuhan. Kedalaman air di dermaga pada saat surut terendah adalah minus 2 meter sedangkan pada surut tertinggi mencapai minus 15 meter. Kolam Pelabuhan (direncanakan 8,5 ha).

d. Dermaga. Dermaga yang dimiliki PPP Labuan sepanjang 100 meter.

e. Alur Pelayaran. Alur Pelayaran pada PPP Labuan memiliki lebar ± 50 meter.

f. Lahan Pelabuhan. Lahan yang dimiliki seluas 74.710 meter persegi (termasuk penambahan lahan seluas ± 30.000 meter persegi / 3 hektare yang diadakan pada tahun 2006).

g. Talud. Talud yang dibangun di PPP Labuan sejak tahun 2002 mencapai 500 meter.

h. Fasilitas Penghubung. Fasilitas jalan utama masuk ke pelabuhan sudah tersedia dengan ukuran panjang $\pm 500 \text{ m}$ dan lebar 3 m. secara umum kondisi jalan penghubung ke pelabuhan dalam kondisi baik.

2. Fasilitas Fungsional

a. Tempat Pelelangan Ikan (TPI). TPI yang dimiliki PPP Labuan berjumlah 2 (dua) unit masing-masing: TPI 1 berukuran 264 m² dan TPI 2 berukuran 537 m². Penyelenggara TPI adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Pandeglang. Adapun dasar penyelenggaraan TPI diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2001.

- b. Cold Storage. PPP Labuan telah memiliki 1 Set Cold storage dengan kapasitas daya tampung ikan sebanyak 10 ton.
- c. Docking Kapal. Docking kapal yang dimiliki PPP Labuan sebanyak 1 unit.
- d. Perbengkelan Nelayan. Perbengkelan nelayan yang dimiliki PPP Labuan sebanyak 1 unit.
- e. Kantor PPP. Kantor yang dimiliki PPP Labuan sebanyak 1 Unit.
- f. Hidrant Umum/Fasilitas Air Bersih. Hidrant umum yang dimiliki PPP Labuan sebanyak 2 unit.

3. Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang yang dimiliki PPP Labuan berupa: Jalan masuk beraspal, drainage, jaringan listrik, dan telepon.

C. Tingkat Operasional Pelabuhan

1. Jumlah Armada

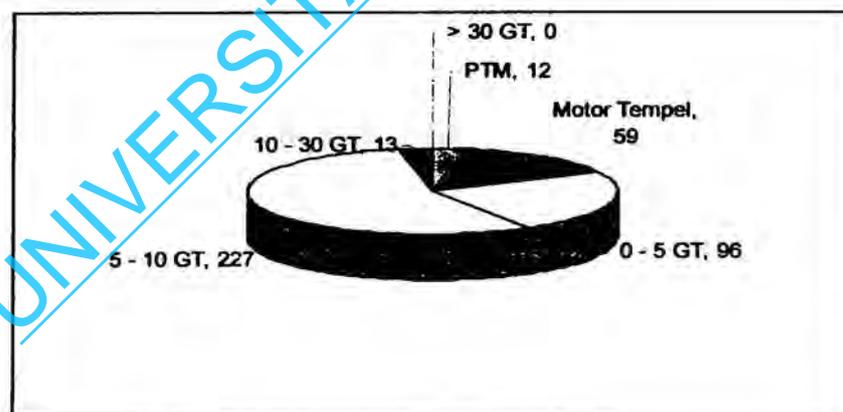
Armada penangkapan ikan di PPP Labuan terdiri dari tiga katagori yaitu Perahu Tanpa Motor (PTM), Motor Tempel (MT) dan Kapal Motor (KM). Secara umum pertumbuhan armada dalam 7 (tujuh) tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 5,68 %. Penurunan jumlah armada paling banyak pada jenis kapal motor ukuran 0 – 5 GT. Hal ini menunjukkan bahwa pola penangkapan di PPP Labuan semakin luas meliputi wilayah perairan yang lebih jauh (diluar perairan pantai).

Tabel 4.1. Perkembangan Armada Penangkapan Ikan di PPP Labuan 2000-2006

| No | Perahu / Kapal | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|----|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Perahu Layar / PTM | 6 | 6 | 30 | 22 | 20 | 15 | 12 |
| 2. | Motor Tempel : | 92 | 94 | 99 | 71 | 120 | 57 | 59 |
| 3. | Kapal Motor : | 532 | 536 | 566 | 411 | 406 | 330 | 336 |
| | 0 – 5 GT | 248 | 250 | 263 | 189 | 113 | 94 | 96 |
| | 5 - 10 GT | 273 | 275 | 291 | 214 | 285 | 225 | 227 |
| | 10 – 30 GT | 11 | 11 | 12 | 8 | 8 | 11 | 13 |
| | > 30 GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 630 | 636 | 695 | 504 | 546 | 402 | 407 |
| | Pertumbuhan (%) | | 0,95 | 9,27 | -27,5 | 8,33 | -26,4 | 1,24 |
| | Pertumbuhan rata-rata (%) | | | | | | | -5,68 |

Sumber : PPP Labuan, 2007

Berdasarkan Tabel 1. di atas dapat dilihat bahwa komposisi armada penangkapan ikan di daerah ini masih didominasi oleh Kapal Motor (KM) ukuran 5 – 10 GT yang tidak mengalami penurunan jumlah secara signifikan (jumlahnya cenderung stabil). Pada sisi lain kita melihat adanya kenaikan jumlah pada KM ukuran 10 – 30 GT dari 11 unit pada tahun 2000 menjadi 13 unit pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan perkembangan positif skala perikanan di PPP Labuan dengan meningkatnya armada skala menengah dan besar. (Gambar 4.3)



Gambar 4.3. Komposisi Armada Penangkapan Ikan di PPP Labuan Tahun 2006

Secara keseluruhan, jumlah armada penangkapan ikan di PPP ini mengalami penurunan sebesar 5,68 %. Penurunan terbanyak terjadi pada tahun 2003 sebesar 27,5 %. Penurunan jumlah armada ini terutama terjadi pada jenis armada kapal perikanan skala

kecil yakni 0 – 5 GT. Sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2000 – 2002 jumlah armada perikanan di PPP Labuan mengalami peningkatan sebanyak 9,27 %.

2. Alat Tangkap

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa alat tangkap yang banyak terdapat di PPP labuan adalah alat tangkap dogol, arad dan jaring rampus (trammel net). Melihat komposisi alat tangkap yang digunakan dapat ditarik kesimpulan bahwa alat-alat tangkap tersebut lebih banyak untuk menangkap ikan jenis pelagis kecil dan ikan demersal. Jumlah alat tangkap ini relatif stabil sepanjang tahun 2000-2006 yang hanya mengalami penurunan sedikit antara kurun waktu tahun 2003 sampai 2006.

Tabel 4.2. Perkembangan Alat Tangkap di PPP Labuan

| No | Perahu / Kapal | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|----|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Payang | 25 | 25 | 28 | 43 | 45 | 44 | 42 |
| 2 | Purse Seine | 10 | 10 | 8 | 16 | 16 | 15 | 16 |
| 3 | Jaring Insang Hanyut | 51 | 51 | 51 | 40 | 40 | 40 | 42 |
| 4 | Bagan Tancap | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 5 | Bagan Rakit | 28 | 28 | 34 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| 6 | Pancing | 26 | 26 | 28 | 32 | 32 | 65 | 55 |
| 7 | Jaring Klitik | 32 | 32 | 32 | 10 | 10 | 4 | 12 |
| 8 | Jaring Rampus | 68 | 68 | 65 | 32 | 30 | 32 | 34 |
| 9 | Arad | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 94 | 95 |
| 10 | Dogol | 193 | 193 | 193 | 40 | 48 | 49 | 50 |
| | Jumlah | 441 | 441 | 447 | 363 | 371 | 367 | 369 |

Sumber : PPP Labuan, 2007

3. Produksi Perikanan

Salah satu ciri berkembangnya suatu pelabuhan perikanan adalah adanya produksi hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan perikanan tersebut. Aktifitas tersebut cukup berkembang di PPP Labuan.

**Tabel 4.3. Perkembangan Produksi Penangkapan Ikan di PPP Labuan
Tahun 2000-2006**

| No | Jenis Ikan | Produksi (Ton) | | | | | | |
|----|---------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1 | Pelagis Besar : | | | | | | | |
| | Tenggiri | 41.2 | 40.7 | 58.9 | 40.2 | 43.8 | 42.9 | 14.3 |
| | Cakalang | 11.5 | 12.5 | 14.2 | 16.2 | 15.4 | 17.2 | 4.3 |
| | Tongkol | 695 | 714.6 | 730.6 | 643.5 | 672 | 668.7 | 230.6 |
| 2 | Pelagis Kecil | 673 | 642 | 873 | 720.3 | 752 | 743.9 | 248 |
| 3 | Demersal | 376.5 | 389 | 472 | 270 | 362 | 373 | 186.5 |
| 4 | Udang | 28.4 | 27.3 | 30.3 | 23.4 | 20.5 | 26.7 | 13.4 |
| 5 | Cumi - cumi | 78.5 | 82.6 | 120.6 | 96.5 | 95.3 | 100.8 | 36 |
| 6 | Ikan Lainnya | 216.7 | 226 | 265 | 162.3 | 180.9 | 176.8 | 63.2 |
| | Total Produksi | 2120.8 | 2134.7 | 2564.6 | 1972.4 | 2141.9 | 2150 | 796.3 |
| | Pertumbuhan rata - rata (%) | | | | | | | 8,33 |
| | Rata - rata prod/bulan (ton) | 176.73 | 177.89 | 213.72 | 164.37 | 178.49 | 179.17 | 66.36 |
| | Rata - rata prod/hari (ton) | 5.81 | 5.85 | 7.03 | 5.40 | 5.87 | 5.89 | 2.18 |

Sumber : PPP Labuan, 2007

Produksi penangkapan ikan di PPP Labuan sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3 mengalami pertumbuhan rata-rata 8,33 % per tahun. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2002 sebesar 19,43 % dari 2.134,7 ton pada tahun 2001 menjadi 2.564,6 ton pada tahun 2002. Namun demikian pada tahun 2003 mengalami penurunan menjadi hanya 1.972,4 (14,94 %) kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2004 sebesar 16,23 % menjadi 2.141,9 ton. Setelah periode itu produksi perikanan di PPP Labuan terus mengalami penurunan hingga hanya mencapai 796,3 ton pada tahun 2006. Perlu diteliti lebih lanjut mengenai gejala penurunan produksi pada periode tersebut. Jenis ikan yang banyak ditangkap adalah ikan-ikan pelagis kecil, pelagis besar (tuna, cakalang, tongkol dan tenggiri) dan ikan-ikan demersal.

4. Jumlah Nelayan

Jumlah nelayan di Pelabuhan Perikanan Labuan pada tahun 2006 sebanyak 1.390 orang. Data ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2005) sebanyak 1.365 orang. Jumlah nelayan di PPP Labuan secara matriks dapat digambarkan dalam Tabel 4.4. di bawah ini.

Tabel 4.4. Jumlah Nelayan di PPP Labuan

| No | Tahun | Nelayan | | | Keterangan |
|----|-------|---------|------|----------------|----------------------------------|
| | | RTP | RTBP | Jumlah (Orang) | |
| 1 | 2005 | 273 | 1092 | 1365 | Data Desa Teluk Kecamatan Labuan |
| 2 | 2006 | 278 | 1112 | 1390 | |
| | | | | | |

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang, 2007

Keterangan: RTP = Rumah Tangga Perikanan, RTBP = Rumah Tangga Buruh Perikanan.

D. Analisis Sistem

Dalam rangka analisis sistem dilakukan identifikasi permasalahan serta kebutuhan pengembangan dan faktor penghambat yang menyebabkan terjadinya kesenjangan (*gap*) antara permasalahan dengan kebutuhan pengembangan. (Gambar 4.4)



Gambar 4.4. Identifikasi permasalahan, faktor penghambat dan kebutuhan Pengembangan PPP Labuan

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dilakukan ditemukan beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan Labuan yakni : tingkat

operasional pelabuhan masih rendah, fasilitas pelabuhan belum berfungsi optimal, sumberdaya manusia (SDM), kelembagaan, serta penyelenggaraan pelelangan belum sesuai aturan. Selain itu ditemukan masalah lainnya yakni praktek penanganan ikan di pelabuhan yang belum sesuai, sanitasi dan higine lingkungan pelabuhan, dan pemukiman nelayan di lokasi pelabuhan yang masih belum tertata.

Sedangkan kebutuhan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan adalah pembangunan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang, penataan kelembagaan dan SDM, penataan perumahan nelayan, penataan penyelenggaraan pelelangan ikan, perbaikan kualitas lingkungan pelabuhan, dan penanganan ikan yang berkualitas.

Kesenjangan (*gap*) antara permasalahan dan kebutuhan pengembangan disebabkan oleh faktor penghambat berupa:

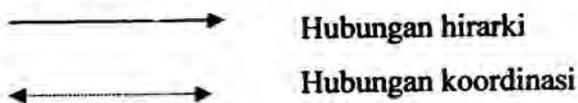
- a. Belum adanya pengelolaan pelabuhan perikanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Lambatnya penyelesaian fasilitas fisik pelabuhan
- c. Alokasi sumberdaya manusia pengelola pelabuhan yang tidak memadai
- d. Rendahnya kesadaran aparaturnya penyelenggara pelelangan ikan untuk melaksanakan praktek pelelangan ikan yang sesuai aturan
- e. Terbatasnya anggaran pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan dari Pemerintah (APBN) dan Pemerintah Daerah (APBD).

Selain itu dilakukan identifikasi sistem penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan, khususnya menyangkut pola hubungan antar stakeholder terkait di PPP Labuan. (Gambar 4.5.)



Gambar 4.5. Pola hubungan antar instansi di PPP Labuan

Keterangan :



E. Analisis Sub Sistem Sumberdaya Ikan

Dalam hal ketersediaan sumberdaya ikan diketahui bahwa nelayan setempat mengenal tiga musim penangkapan ikan yaitu musim puncak, musim normal, dan musim paceklik.

Musim puncak merupakan keadaan dimana nelayan setempat dapat mencari ikan dengan mudah (tidak terlalu jauh *fishing ground*-nya) serta menghasilkan banyak ikan. Musim puncak ini biasanya terjadi pada bulan Mei sampai Agustus. Daerah penangkapan (*fishing ground*) nelayan setempat pada umumnya di sekitar Selat Sunda. Dalam istilah nelayan lokal daerah penangkapan ikan disebut *tandesan*. *Tandesan* nelayan Labuan berada di sekitar perairan anak Gunung Krakatau, perairan Pulau Liwungan, dan perairan Pulau Panaitan.

Musim normal atau musim biasa merupakan keadaan dimana nelayan setempat dapat memperoleh hasil tangkapan, namun tidak terlalu banyak. Musim biasa ini biasanya terjadi pada bulan Januari sampai April.

Musim paceklik merupakan keadaan dimana nelayan setempat sedikit memperoleh hasil tangkapan. Pada musim ini nelayan Labuan dapat menangkap ikan sampai perairan Lampung. Musim paceklik biasanya terjadi pada bulan September sampai Desember.

Namun demikian, secara umum kegiatan penangkapan ikan di Selat Sunda berlangsung hampir sepanjang tahun. Hal ini disebabkan nelayan setempat dapat menggunakan berbagai jenis alat tangkap untuk menangkap ikan yang sesuai dengan musimnya. Berdasarkan hasil wawancara perkiraan pola musim penangkapan beberapa jenis ikan yang dominan didaratkan di PPP Labuan dapat digambarkan sesuai (Tabel 4.5).

Tabel 4.5. Perkiraan pola musim penangkapan beberapa jenis ikan yang idaratkan di PPP Labuan

| No | Jenis ikan | Bulan | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|-------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nop | Des |
| 1 | Selar | xxx | xxx | xxx | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | /// | /// | /// | /// |
| 2 | Tongkol | xxx | xxx | /// | /// | /// | /// | /// | +++ | +++ | +++ | +++ | xxx |
| 3 | Teri | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | +++ | +++ | +++ | +++ | xxx | xxx | xxx |
| 4 | Tenggiri | xxx | xxx | /// | /// | /// | /// | /// | +++ | +++ | +++ | +++ | xxx |
| 5 | Peperek | xxx | xxx | xxx | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | /// | /// | /// | /// |
| 6 | Bawal | xxx | xxx | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | /// | /// | /// | /// | /// |
| 7 | Layang | xxx | xxx | /// | /// | /// | /// | /// | +++ | +++ | +++ | +++ | xxx |
| 8 | Kakap Merah / Bambangan | xxx | xxx | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | /// | /// | /// | /// | /// |
| 9 | Kerapu | xxx | xxx | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | /// | /// | /// | /// | /// |
| 10 | Tigawaja / Ikan sebelah | xxx | xxx | xxx | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | /// | /// | /// | /// |
| 11 | Kurisi | xxx | xxx | xxx | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | /// | /// | /// | /// |
| 12 | Kuro | xxx | xxx | +++ | +++ | +++ | +++ | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 13 | Udang | xxx | xxx | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | /// | /// | /// | /// | xxx |
| 14 | Rajungan | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 15 | Cekong / Tembang | xxx | xxx | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | /// | /// | /// | xxx | xxx |
| 16 | Raja gantang | xxx | xxx | xxx | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | /// | /// | /// | /// |
| 17 | Cumi-cumi | xxx | xxx | xxx | xxx | +++ | +++ | +++ | /// | /// | /// | /// | xxx |
| Keterangan : | | xxx | = | musim sedikit ikan (paceklik) | | | | | | | | | |
| | | /// | = | musim biasa | | | | | | | | | |
| | | +++ | = | musim banyak ikan (puncak) | | | | | | | | | |

Selain beberapa jenis ikan diatas terdapat juga jenis ikan lainnya yang pola musimnya berbeda, seperti jenis Ikan Kembung biasanya puncak musim penangkapan di PPP Labuan terjadi setiap 3 (tiga) tahun sekali antara bulan April – Agustus. Sementara untuk Ikan Tuna tidak ada produksi yang didaratkan karena tidak ada alat tangkap yang beroperasi di PPP Labuan.

Dalam hal ini keragaman jenis ikan yang didaratkan di PPP Labuan serta pola musim penangkapan yang ada sangat dipengaruhi oleh keberadaan kapal penangkapan dan alat penangkapan ikan yang beroperasi di PPP Labuan. Artinya semakin tingkat keberagaman dan jumlah kapal dan alat tangkap yang beroperasi di PPP Labuan dapat mempengaruhi tingkat produksi dan keberagaman sumberdaya ikan yang didaratkan.

Untuk tingkat produksi berdasarkan jenis ikan yang dominan didaratkan di PPP Labuan didapatkan data bahwa tingkat produksi tertinggi adalah jenis ikan tongkol yakni mencapai 230,6 Kg dari total produksi sebanyak 796,3 kg. Total produksi yang didapat berasal dari kapal yang beroperasi sebanyak 407 unit. Perbandingan produksi ikan yang didaratkan dengan kapal yang beroperasi di PPP Labuan secara lebih rinci dapat digambarkan dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Perbandingan produksi ikan yang didaratkan dengan kapal yang beroperasi di PPP Labuan

| Uraian | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-------|
| Produksi - Volume (ton) | 2120.8 | 2134.7 | 2564.6 | 1972.4 | 2141.9 | 2150 | 796.3 |
| Kapal (buah) | | | | | | | |
| a. PTM | 6 | 6 | 30 | 22 | 20 | 15 | 12 |
| b. PMT | 92 | 94 | 99 | 71 | 120 | 57 | 59 |
| c. KM | 532 | 536 | 566 | 411 | 406 | 330 | 336 |

F. Analisis Sub Sistem Fasilitas

Pemanfaatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan dianggap belum optimal karena masih banyaknya kapal perikanan yang belum memanfaatkan fasilitas pelabuhan perikanan yang tersedia, seperti kolam pelabuhan, dermaga, tambatan, dan

beberapa fasilitas penunjang lainnya seperti stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), Tempat Pelelangan Ikan, dan *Cold Storage*. Berdasarkan pengamatan langsung dan wawancara di lokasi penelitian, didapatkan data bahwa dari 98 (sembilan puluh delapan) unit kapal yang secara aktif keluar masuk dermaga setiap hari (lihat tabel 4.6) hanya 27, 27 % saja yang masuk pelabuhan, sementara sisanya (72,72 %) memilih menggunakan muara sungai sebagai tempat berlabuh dan pelabuhan swasta yang ada di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan. (Tabel 4.7)

Tabel 4.7. Jumlah Kunjungan Kapal Setiap Hari di Pelabuhan Perikanan Labuan, 2008

| No | Jenis Kapal | GT | Banyaknya (unit) | Total GT |
|----|--------------------------|----|------------------|----------|
| 1. | Kapal Purse Seine | 12 | 9 | 108 |
| 2. | Kapal Payang | 6 | 25 | 150 |
| 3. | Kapal Jaring (Gillnet) | 6 | 7 | 42 |
| 4. | Kapal Rawai | 5 | 30 | 150 |
| 5. | Kapal Gardan | 8 | 17 | 136 |
| 6. | Kapal Palele (Pengumpul) | 6 | 10 | 60 |
| | Jumlah | | 98 unit kapal | 646 GT |

Tabel 4.8. Prosentase Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan, 2008

| No | Uraian | Jumlah | % |
|----|---|--------|-------|
| 1. | Kapal yang memanfaatkan fasilitas pelabuhan | 21 | 27,27 |
| 2. | Kapal yang tidak memanfaatkan fasilitas pelabuhan | 77 | 72,72 |
| | Jumlah | 98 | 100 |

Tingkat pemanfaatan fasilitas pelabuhan yang rendah disebabkan karena kondisi fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan secara umum masih dalam

tahap konstruksi. Beberapa fasilitas pokok pelabuhan yang masih dalam tahap konstruksi meliputi : breakwater sisi kanan, breakwater sisi kiri, dermaga, dan kolam pelabuhan (dalam proses pengerukan). Gambaran kondisi fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan disajikan dalam Tabel 4.9.

Hal lain yang menyebabkan pemanfaatan fasilitas pelabuhan yang rendah adalah pelayanan pelelangan ikan yang masih rendah. Pemakai jasa tempat pelelangan ikan (TPI) pada umumnya mengeluhkan kondisi fasilitas TPI yang buruk (kurang higienis), sarana TPI yang tidak memadai, serta cara pembayaran hasil lelang yang belum kontan (*cash*).

Tabel 4.9. Kondisi Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan

| Fasilitas | Kapasitas Terpasang | Kapasitas Terpakai | Status Pemanfaatan | Kondisi |
|-----------------------------|--|--|---------------------|-----------------------|
| Fasilitas Pokok | | | | |
| Breakwater kanan, kiri | 420 m, 213,5 m | 420 m, 213,5 m | Dimanfaatkan | Tahap konstruksi |
| Dermaga | 100 | 50 m | Kurang Dimanfaatkan | Tahap konstruksi |
| Alur Pelayaran (lebar) | 50 m | - | Dimanfaatkan | Tahap konstruksi |
| Kolam Pelabuhan (kedalaman) | 0,5 – 2 m | 21 kapal | Kurang Dimanfaatkan | Tahap konstruksi |
| Fasilitas Fungsional | | | | |
| TPI I dan II | 264 m ² , 537 m ² | 264 m ² , 537 m ² | Dimanfaatkan | Kotor, tidak higienis |
| SPDN | 15.000 liter | - | Tidak dimanfaatkan | Baik |
| Instalasi Listrik | 1.300 KVA | 1.300 KVA | Dimanfaatkan | Baik |
| Bengkel | 10 kapal | - | Tidak dimanfaatkan | Rusak |
| Telepon | 2 unit | 2 unit | Dimanfaatkan | Baik |
| Depot Es | 2 ton/hari | 2 ton/hari | Dimanfaatkan | Baik |
| Fasilitas Penunjang | | | | |
| MCK | 2 unit | - | Tidak dimanfaatkan | Rusak |
| Mesjid | 100 m ² | 100m ² | Dimanfaatkan | Baik |

| Fasilitas | Kapasitas Terpasang | Kapasitas Terpakai | Status Pemanfaatan | Kondisi |
|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------|
| Kios Bahan Perbekalan | 8 buah | 8 buah | Dimanfaatkan | Baik |
| Kantor UPT | 100 m ² | 100m ² | Dimanfaatkan | Sedang |
| Koperasi | 2 unit | 2 unit | Dimanfaatkan | Baik |
| Poliklinik | 1 unit | 1 Unit | Dimanfaatkan | Baik |
| Kantor Syahbandar | 1 unit | 1 Unit | Dimanfaatkan | Baik |
| Instalasi Limbah / Sampah | 4 x 2 m | - | Kurang dimanfaatkan | Baik |

Dilihat dari kebutuhan proporsional fasilitas pelabuhan masih ditemukan perbedaan (kesenjangan) kebutuhan fasilitas dengan kondisi aktual di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan menggunakan persamaan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2001). Kebutuhan proporsional fasilitas pelabuhan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Panjang Dermaga

Panjang dermaga yang dianggap proporsional sepanjang ± 260 meter, dengan mengacu pada data sebagai berikut: panjang rata-rata kapal yang berlabuh di PPP Labuan sepanjang 13 meter, jarak antar kapal 0,5 meter, jumlah kapal di dermaga 21 unit, berat kapal (*dead weight ton*) 3 ton, lama kapal di dermaga 8 jam, produksi rata-rata per hari 2,18 ton dan lama fishing trip 12 jam. Melihat kondisi aktual dermaga yang sudah dibangun sepanjang 100 meter maka masih terdapat kekurangan sepanjang 160 meter.

2. Luas Kolam Pelabuhan

Luas kolam pelabuhan yang dibutuhkan PPP Labuan adalah 6.019 m². Perhitungan luas ini didapatkan berdasarkan data luas untuk memutar kapal (Lt) = 169 m², jumlah kapal maksimal yang berlabuh sebanyak 50 unit, panjang kapal 13 meter dan lebar kapal 3 meter.

Dengan luas kolam pelabuhan seperti di atas maka kapal yang berlabuh dapat dilayani secara optimal di kolam pelabuhan.

Apabila dilihat kondisi aktual di PPP Labuan maka dapat disimpulkan bahwa luas kolam dimaksud sudah dapat dikatakan memadai. Diperkirakan luas kolam pelabuhan pada PPP Labuan saat ini mencapai 8.000 m².

3. Kedalaman Kolam Pelabuhan

Kedalaman kolam pelabuhan yang ideal adalah 405 cm (4,05 meter) untuk menampung kapal-kapal berukuran menengah dan besar. Kedalaman kolam tersebut dihasilkan dari perhitungan draft kapal terbesar dengan muatan penuh (d) = 250 cm, tinggi gelombang maksimal di kolam pelabuhan (H) = 50 cm, tinggi anggukan kapal yang melaju (S) = 30 cm, dan jarak aman dari lunas kapal ke dasar perairan (C) = 100 cm.

Saat ini diketahui kedalaman kolam pelabuhan di PPP Labuan berkisar antara 2 meter (dekat dermaga) sampai dengan 3 meter (di tengah kolam). Hal ini menunjukkan masih adanya kekurangan pengerukan antara 1 – 2 meter.

4. Luas Gedung Pelelangan

Berdasarkan hasil perhitungan luas gedung pelelangan yang dianggap ideal adalah 436 meter persegi. Hal ini didasarkan pada perhitungan bahwa produksi tertinggi yang didaratkan di PPP Labuan dalam sehari (N) mencapai 125 ton, intensitas lelang sebanyak 2 kali dalam sehari, daya tampung produksi sebanyak 6 m²/ton, serta perbandingan ruang lelang dengan gedung lelang 0,86.

Saat ini PPP Labuan memiliki 2 (dua) unit Tempat Pelelangan Ikan (TPI) masing-masing TPI 1 berukuran 264 m² dan TPI 2 berukuran 537 m² atau jumlah komulatif mencapai 801 m². Apabila melihat data ini maka dapat dikatakan luas gedung pelelangan sudah memenuhi syarat ideal, bahkan luasnya melebihi kebutuhan. Namun demikian pola pelelangan masih terpisah pada 2 (dua) TPI sehingga menyulitkan manajemen pelelangan. Dalam kaitan itu diusulkan untuk membangun 1 (satu) unit TPI terpadu yang lebih representatif dan higienis.

Secara umum berdasarkan analisis sub sistem fasilitas di atas dapat digambarkan perbandingan (proporsi) antara fasilitas pelabuhan yang dibutuhkan dengan kondisi fasilitas aktual, sebagaimana Tabel 4.10.

Tabel 4.10. Perbandingan fasilitas pelabuhan yang dibutuhkan dengan kondisi aktual fasilitas di PPP Labuan

| No | Uraian Fasilitas | Proporsi Kebutuhan Fasilitas | Kondisi Aktual | Keterangan (-/+) |
|----|---------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. | Panjang Dermaga | 260 m | 100 | -160 m |
| 2. | Luas Kolam Pelabuhan | 6.019 m ² | 8.000 m ² | +1.981 m ² |
| 3. | Kedalaman Kolam Pelabuhan | 405 cm | 200 cm | -205 cm |
| 4. | Luas Gedung Pelelangan | 436 m ² | 801 m ² | + 365 m ² |

Perlu disampaikan dalam penelitian ini bahwa hasil perhitungan fasilitas di atas berlaku untuk kondisi tingkat operasional pelabuhan saat ini. Perhitungan kebutuhan pengembangan fasilitas pelabuhan sangat tergantung dari perkembangan tingkat operasional pelabuhan pada masa-masa mendatang, khususnya terkait intensitas kapal yang beroperasi di pelabuhan serta tingkat produksi hasil perikanan yang didaratkan di PPP Labuan.

Dengan asumsi bahwa pengembangan fasilitas pelabuhan akan mempengaruhi tingkat kunjungan kapal serta peningkatan jumlah produksi hasil perikanan yang didaratkan di PPP Labuan, maka dapat disimpulkan bahwa proporsi kebutuhan fasilitas pelabuhan juga akan mengalami peningkatan.

Untuk panjang dermaga yang dibutuhkan sampai dengan 5 tahun mendatang diperkirakan masih memadai (*feasible*). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perkiraan jumlah kapal yang merapat di dermaga maksimum sebanyak 21 unit dengan panjang rata-rata 13 meter. Asumsi lainnya adalah pihak otoritas pelabuhan melakukan pengaturan penggunaan dermaga digunakan hanya untuk bongkar dan muat kapal, bukan untuk keperluan lain. Bagi kapal yang telah selesai melakukan bongkar, sementara menunggu untuk berlayar kembali dalam beberapa hari diarahkan ke kolam pelabuhan untuk lego jangkar.

Sementara untuk luas kolam pelabuhan yang dibutuhkan diperkirakan mengalami peningkatan menjadi 8.944 m² dengan asumsi bahwa jumlah kapal yang berlabuh

bertambah menjadi sebanyak 75 unit, panjang kapal 13 meter dan lebar kapal 3 meter, serta luas untuk memutar kapal (L_t) = 169 m².

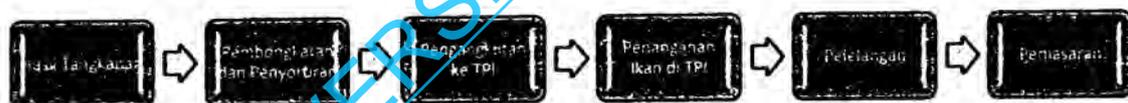
Kedalaman kolam pelabuhan yang dibutuhkan diperkirakan mencapai masih memadai sedalam 405 cm. Kedalaman tersebut masih memungkinkan untuk berlabuhnya kapal-kapal sampai dengan ukuran 250 *gross tonage* (GT).

Sedangkan luas gedung pelelangan yang dibutuhkan PPP Labuan pada 5 tahun mendatang diperkirakan masih sesuai mengingat hasil perhitungan di atas telah memperhitungkan jumlah produksi tertinggi sehari (N) yakni sebanyak 125 ton, intensitas lelang sebanyak 2 kali dalam sehari, daya tampung produksi sebanyak 6 m²/ton, serta perbandingan ruang lelang dengan gedung lelang 0,86.

G. Analisis Sub Sistem Aktivitas

Aktivitas yang dianalisis adalah penanganan hasil produksi penangkapan di pelabuhan sejak pembongkaran sampai pengangkutan ke tempat pelelangan ikan. Selain itu dilakukan analisis terhadap perbandingan antara berat es dengan berat ikan, lama pembongkaran, wadah/keranjang yang digunakan dalam mengangkut ikan dan lantai tempat pelelangan berlangsung.

Secara umum *flow chart* aktivitas di PPP Labuan dapat digambarkan dalam Gambar 4.6. dibawah ini



Gambar 4.6. Alur Proses Aktivitas di PPP Labuan

Berdasarkan alur proses aktivitas di PPP Labuan sebagaimana disebutkan diatas dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

1. Proses Pembongkaran dan Penyortiran Ikan

Pada saat kapal merapat di dermaga, para Anak Buah Kapal (ABK) membongkar hasil tangkapannya dari palkah. Ikan-ikan yang telah dikeluarkan dari palkah kemudian diletakkan di atas geladak kapal, baru kemudian dilakukan penyortiran. Penyortiran

dilakukan menurut ukuran besar/kecilnya ikan, jenis dan mutu ikan (bagus/rusak). Ikan – ikan yang telah disortir dimasukkan ke dalam keranjang plastik (basket) dengan daya tampung 20 sampai 25 kg atau dimasukkan ke dalam "Blong" dalam jumlah ikan yang relatif banyak dengan daya tampung \pm 80 kg. Basket atau Blong yang dipakai adalah milik para "Langgan" (juragan ikan) yang membeli ikan dari nelayan yang bersangkutan.

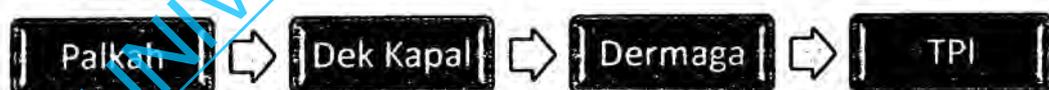
Setelah disortir ikan–ikan tidak melalui proses pencucian terlebih dahulu tetapi langsung dimasukkan ke dalam keranjang atau blong, karena sebelum dimasukkan ke dalam palkah ikan sudah bersih.

2. Pengangkutan ke TPI

Pada proses pengangkutan ikan ke TPI, keranjang–keranjang atau blong yang telah penuh ikan dibawa secara manual menggunakan tenaga manusia, hanya sedikit nelayan yang menggunakan alat bantu *handling* berupa kereta dorong. Kebanyakan para nelayan secara manual memikul keranjang atau blong dengan tenaga manusia sebanyak 2– 4 orang.

Kesulitan yang dihadapi nelayan dalam proses pengangkutan ikan ke TPI 2 yakni kendala jarak yang masih cukup jauh antara dermaga bongkar dengan lokasi TPI yakni sekitar 200 meter, sehingga memerlukan tenaga dan waktu yang cukup lama dalam proses pengangkutannya.

Alur proses pendaratan dan pengangkutan ikan di Pelabuhan Perikanan Labuan dapat dilihat pada Gambar 4.7.



Gambar 4.7. Alur Proses Pendaratan dan Pengangkutan Ikan di PPP Labuan

3. Penanganan ikan di TPI

Pada saat ikan di TPI penanganan dilakukan di lantai TPI, hanya sebagian yang menggunakan wadah dengan cara dimasukkan kedalam blong ikan yang disediakan para langgan. Ikan yang diletakkan di lantai lelang sama sekali tidak dibersihkan dengan air

bersih karena tidak adanya fasilitas yang mendukung berupa alat penyemprot lantai dan ikan.

Ikan-ikan yang dilelang di TPI Labuan tidak melalui proses penimbangan terlebih dahulu, karena para nelayan telah terbiasa dengan sistem taksiran. Mereka menganggap cara tersebut lebih praktis dan cepat, namun hal itu menyebabkan sulitnya mendata volume ikan yang dilelang.

Ikan-ikan yang masuk pelelangan adalah ikan-ikan hasil tangkapan dari kapal dengan trip harian (*one day fishing*) seperti kapal payang, rampus, gillnet, jaring klitik, dll. Jenis ikan yang dominan dilelang diantaranya ikan manyung, kuniran, kurisi, kembang, layur, cumi-cumi, tongkol, selar, tembang, tenggiri dan layang.

4. Proses Pelelangan Ikan

Berdasarkan waktu dan frekuensi pendaratan masing – masing TPI di PPP Labuan memiliki waktu pelelangan ikan yang berbeda. TPI 1 atau dalam istilah nelayan setempat disebut TPI Gardan (karena mayoritas kapal yang mendaratkan ikannya disini menggunakan alat tangkap Gardan) biasanya melakukan pendaratan pada pukul 04⁰⁰ sampai 05⁰⁰ WIB dan pukul 11⁰⁰ sampai 12⁰⁰ WIB. Pada TPI 2 nelayan biasa menyebutnya dengan TPI *purse seine*, kapal-kapalnya melakukan pendaratan 03⁰⁰ sampai 05⁰⁰ WIB dan pukul 16⁰⁰ sampai 18⁰⁰ WIB.

Proses pelelangan ikan di TPI Labuan dipimpin oleh seorang juru tawar dan dihadiri oleh juru catat, peserta lelang dan pemilik ikan. Proses pelelangan dimulai setelah basket atau blong yang penuh ikan hasil tangkapan diangkut ke TPI. Ikan hasil tangkapan itu kemudian dikeluarkan dari basket atau blong dan diletakkan langsung di atas lantai TPI tanpa dimasukkan dalam keranjang terlebih dahulu. Ikan disusun menjadi 4 sampai 5 gundukan tergantung banyaknya ikan. Setelah semua ikan disusun menjadi beberapa gundukan maka pelelangan ikan dimulai. Petugas pelelangan yaitu juru tawar akan menyebutkan harga penawaran ikan untuk tiap jenis ikan per satu gunduknya melalui pengeras suara. Harga penawaran awal disesuaikan dengan harga ikan di pasaran saat itu, kemudian meningkat sampai tercapai harga penawaran tertinggi dari calon pembeli. Biasanya calon pembeli akan mengacungkan tangan, tanda setuju dengan harga

yang ditawarkan. Setelah terjadi kesepakatan harga, ikan akan langsung diangkut oleh para pemenang lelang.

Selama proses pelelangan, nelayan pemilik ikan akan mencatat jenis ikan, jumlah gundukan ikan, harga ikan per gunduk dan nama pemenang lelang. Setelah selesai pelelangan, catatan tersebut akan diberikan kepada petugas TPI, yaitu juru catat untuk dibuatkan karcis lelang. Karcis lelang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, satu untuk pemenang lelang, satu untuk nelayan dan satu lagi untuk arsip pihak TPI. Kendala yang dihadapi pengelola TPI adalah para pemenang lelang akan menyetorkan sejumlah uang atas pembelian ikan ditambah retribusi lelang setelah ikannya terjual habis. Pada kenyataannya banyak para bakul/pedagang yang mengalami kesulitan dalam pembayaran ke pihak TPI, sehingga banyak yang mempunyai tunggakan pembayaran. Hal ini merupakan kendala besar yang dihadapi oleh pihak TPI, karena pihak TPI harus membayar ikan yang dilelang pada nelayan.

Ikan-ikan yang dilelang di TPI Labuan tidak melalui proses penimbangan terlebih dahulu, karena para nelayan telah terbiasa dengan sistem taksiran. Mereka menganggap cara tersebut lebih praktis dan cepat, namun hal itu menyebabkan sulitnya mendata volume ikan yang dilelang secara tepat yang pada akhirnya menyebabkan sulitnya menentukan besarnya retribusi lelang.

Dasar hukum pungutan/retribusi lelang diambil berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir.

Adapun rincian dari retribusi lelang menurut ketentuan Perda tersebut adalah sebagai berikut.

Sumber pungutan :

- a. 5 % dari nelayan/penjual ikan.
- b. 3 % dari bakul/pembeli ikan.

Diperuntukkan :

- a. 4 % disetor ke Pemda melalui bendaharawan penerima Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang.
- b. 2 % biaya operasional penyelenggaraan TPI.
- c. 1 % simpanan.

- d. 0,5 % sebagai dana paceklik yang dibagikan setiap tahun sekali menjelang Hari Raya Idul Fitri.
- e. 0,5 % sebagai dana sosial kecelakaan di laut.

Kendala yang dihadapi pengelola TPI adalah sumber pungutan untuk retribusi lelang dari para bakul/pedagang sebesar 3 % sering macet. Pada saat lelang para bakul/pedagang mengambil ikan hasil lelang dengan sistem pembayaran setelah penjualan hasil ikan. Banyak dari para bakul/pedagang yang akhirnya tidak membayar kewajiban mereka untuk membayar retribusi lelang. Solusi yang diambil pihak TPI adalah mengambil uang dari sumber penghasilan nelayan sebesar 5 %, untuk memenuhi target pendapatan daerah sebesar 4 % yang harus disetor ke Pemda. Akibatnya nelayan tidak mendapatkan hak sepenuhnya untuk mendapatkan dana sosial kecelakaan di laut dan dana paceklik, karena dana yang ada tidak mencukupi.

5. Penggunaan Es dalam Kegiatan Penanganan Ikan

Pemenuhan kebutuhan es di PPP Labuan disediakan secara perseorangan oleh pengusaha setempat. Es digunakan oleh nelayan sebagai bahan pengawet ikan agar tidak cepat busuk dan sebagian ada juga yang dipakai sebagai konsumsi oleh penduduk setempat.

Penggunaan es untuk kebutuhan melaut oleh nelayan Labuan berbeda-beda berdasarkan jenis kapal serta lamanya melaut, misalnya untuk kapal rawai (GT. 10 – 15, alat tangkap pancing rawai) menggunakan es sebanyak 10 balok untuk 3 hari melaut. 1 balok es diperkirakan memiliki berat 50 kg. Sedangkan untuk kapal *purse seine* (GT.30, alat tangkap *purse seine*) penggunaan es-nya relatif lebih banyak yakni mencapai 10 – 15 balok untuk 2 hari melaut. Jumlah itu digunakan seluruhnya di dalam palka untuk mendinginkan ikan. Pada saat akan dimasukkan ke dalam palka es terlebih dahulu dihancurkan secara manual menggunakan tenaga manusia dengan dipukul-pukul.

Berdasarkan pengamatan langsung dan wawancara di lapangan diketahui bahwa perbandingan penggunaan es dengan berat ikan adalah 1 : 2. Artinya nelayan Labuan menggunakan es untuk penanganan di atas kapal adalah sebanyak 1 kg untuk 2 kg ikan.

H. Analisis Sub Sistem Kelembagaan

Untuk melakukan analisis kelembagaan Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan dalam rangka optimalisasi peran lembaga kepelabuhanan terlebih dahulu diidentifikasi pemangku kepentingan, peran masing-masing dalam kegiatan pengendalian SDK serta aktivitas yang dikehendaki (analisis *stakeholder*). Tabel 4.11.

Tabel 4.11. Analisis *Stakeholder* PPP Labuan

| No | Pemangku Kepentingan | Peran | Aktivitas yang Dikehendaki |
|----|--|---|--|
| 1. | Dinas Kelautan dan Perikanan | Menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan pelabuhan perikanan di daerah. Melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan. Membangun dan mengembangkan Pelabuhan Perikanan di daerah. Melaksanakan pembinaan nelayan. | Melaksanakan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan, menciptakan regulasi, dibidang kepelabuhanan yang inovatif, serta pelaksanaan pembinaan nelayan di pelabuhan perikanan. |
| 2. | UPTD Pelabuhan Perikanan (Penyelenggara Pelabuhan Perikanan) | Melaksanakan operasionalisasi pengelolaan pelabuhan perikanan serta fasilitasi penyelenggaraan fungsi pembinaan nelayan di pelabuhan. | Memberikan pelayanan kepelabuhanan secara professional yang berorientasi pada kepuasan pengguna (nelayan) |
| 3. | Penyelenggara Pelelangan Ikan | Menyelenggarakan pelayanan ikan sesuai peraturan perundang yang berlaku | Melaksanakan pelelangan ikan secara wajar sesuai peraturan penyelenggaraan pelelangan ikan |
| 4. | Syahbandar | Melaksanakan perijinan pelayaran (SIB, Pas Biru, dll) serta pengawasan keselamatan kapal | Memberikan pelayanan perijinan pelayaran dan pengawasan keselamatan kapal perikanan |
| 5. | Kesehatan Pelabuhan | Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan | Memberikan pelayanan kesehatan kepada nelayan dan masyarakat sekitar pelabuhan perikanan |
| 6. | Koperasi Perikanan | Menyelenggarakan usaha pendukung penyelenggaraan pelabuhan perikanan | Menyediakan kebutuhan logistik kapal perikanan |
| 7. | HNSI | Ikut serta dalam pembinaan dan pengembangan nelayan dalam lingkup pelabuhan perikanan | Berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan nelayan |

Berdasarkan analisis *stakeholder* diatas dapat dipetakan peran masing – masing pihak dalam pengelolaan Pelabuhan Perikanan Labuan. Masing – masing instansi atau lembaga terkait dalam penyelenggaraan pelabuhan perikanan merupakan satu kesatuan yang saling menunjang untuk kelancaran operasional pelabuhan. Optimalnya pelaksanaan

fungsi lembaga kepelabuhanan ini akan mempengaruhi kinerja operasional Pelabuhan Perikanan Labuan.

Dalam hal peraturan perundang – undangan (berupa Perda, Pergub, dll) bidang pelabuhan perikanan yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan PPP Labuan dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (PPI) yang mengatur tentang mekanisme penyelenggaraan pelelangan ikan di setiap kabupaten/kota serta bagi hasil retribusi pelelangan perikanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
2. Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten yang mendukung penyelenggaraan pelabuhan perikanan (Revisi dari Perda 15/2002).
3. Peraturan Daerah tentang Penetapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kelautan dan Perikanan yang didalamnya memuat tentang sumber PAD dari Jasa Pelabuhan Perikanan
4. Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Tata Cara, Sistem dan Prosedur Pemungutan Retribusi Daerah Sektor Kelautan dan Perikanan
5. Peraturan Gubernur tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Perikanan Banten
6. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pemungutan PAD bidang Jasa Kepelabuhanan Perikanan bagi UPTD Pelabuhan Perikanan

Berdasarkan hasil identifikasi diatas dilakukan pemetaan peraturan perundang – undangan dimaksud sebagaimana dalam Tabel 4.12. dibawah ini.

**Tabel 4.12. Pemetaan Peraturan Perundang – Undangan
yang Mendukung Operasional PPP Labuan**

| No | Pengaturan dalam Penyelenggaraan PPP Labuan | Peraturan yang Dibutuhkan | Peraturan yang Sudah Ada |
|----|---|--|--|
| | Pengaturan mekanisme penyelenggaraan pelelangan ikan di PPP Labuan | Perda tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (PPI) | Perda Kabupaten Pandeglang No. 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan bagi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan |
| | SOTK Dinas Kelautan dan Perikanan yang mendukung penyelenggaraan pelabuhan perikanan | Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten | Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang SOTK Dinas Daerah Provinsi Banten |
| | Peraturan yang mengatur pendapatan daerah dari jasa pelabuhan perikanan | Peraturan Daerah tentang Penetapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kelautan dan Perikanan | Belum ada |
| | Petunjuk Teknis Tata Cara, Sistem dan Prosedur Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Pelabuhan Perikanan | Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Tata Cara, Sistem dan Prosedur Pemungutan Retribusi Daerah Sektor Kelautan dan Perikanan | Belum ada |
| | Penetapan UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan | Peraturan Gubernur tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Perikanan Banten | Belum ada |
| | Petunjuk Teknis Pemungutan PAD bidang Jasa Kepelabuhanan Perikanan bagi UPTD PPP Labuan | Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pemungutan PAD bidang Jasa Kepelabuhanan Perikanan bagi UPTD Pelabuhan Perikanan | Belum ada |

Dalam hal pengaturan pelelangan ikan yang diatur dalam Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2001 diatur pola mekanisme penyelenggaraan pelelangan ikan yang diberlakukan bagi seluruh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Pandeglang, termasuk di PPP Labuan.

Berkenaan dengan perlunya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Kelautan dan Perikanan yang mendukung penyelenggaraan pelabuhan perikanan, dapat

disimpulkan bahwa hal tersebut sudah dapat dipenuhi. Pada tingkat Pemerintah Provinsi Banten telah diterbitkan Perda Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 Tanggal 03 Januari 2008 tentang SOTK Dinas Daerah Provinsi Banten, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan yang didalamnya telah memuat unit kerja yang membidangi pelabuhan perikanan yakni **Seksi Pelabuhan dan Armada Perikanan** pada Bidang Sumberdaya Kelautan.

Namun demikian pada tingkat otoritas pelabuhan perikanan di PPP Labuan masih ditemukan kelemahan kelembagaan pengelola pelabuhan. Sampai saat dilakukan penelitian ini belum ada kelembagaan pengelolaan pelabuhan yang lengkap dan permanen. Pengelolaan pelabuhan di PPP Labuan dilakukan lembaga pengelola yang sifatnya sementara dimana pejabat pengelola pelabuhan merupakan staf pelaksana Pemerintah Provinsi Banten yang ditempatkan sebagai pelaksana tugas pengelola pelabuhan. Struktur organisasi pelaksana tugas pengelola pelabuhan digambarkan dalam Gambar 4.8.



Gambar 4.8. Struktur Organisasi PPP Labuan

Dalam hal kelembagaan pelabuhan perikanan perlu juga disampaikan dalam penelitian ini bahwa terdapat 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penyelenggaraan lembaga pengelola pelabuhan perikanan, termasuk di Pelabuhan

Perikanan Pantai Labuan. Peraturan dimaksud yakni : Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor Per.02/Men/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan. Dari 2 (dua) peraturan perundang-undangan diatas terdapat perbedaan yang terkait dengan eselonisasi pejabat struktural pengelola pelabuhan. Hal ini yang menyebabkan perbedaan jabatan dan kepangkatan pengelola pelabuhan antara Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat dan pengelola PPP yang menjadi UPT daerah. Berdasarkan peraturan diatas kepala PPP pada UPT pusat hanya dijabat oleh pejabat struktural eselon IV, sedangkan kepala PPP UPT daerah dijabat oleh pejabat struktural eselon III.

I. Analisis Kebijakan Pengembangan PPP Labuan

1. Perbandingan Antar Kriteria

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan dilihat dari aspek sumberdaya ikan, sosial, ekonomi daerah, infrastruktur dan kelembagaan berdasarkan proses hirarki analitik diperoleh hasil bahwa sumberdaya ikan (kualitas, ketersediaan dan kuantitas) merupakan aspek terpenting dengan nilai prioritas 0,389. Prioritas kedua adalah aspek sosial (pelayanan, kenyamanan, dan keamanan) dengan nilai prioritas 0,186, kemudian aspek infrastruktur (ketersediaan dan kualitas) dengan nilai prioritas 0,179, aspek kelembagaan (organisasi, SDM, dan perangkat hukum) dengan nilai prioritas 0,127 dan prioritas terakhir adalah aspek ekonomi daerah (pendapatan masyarakat, dan pendapatan daerah) dengan nilai prioritas sebesar 0,120. Perbandingan antar kriteria dapat dilihat dalam Tabel 4.13.

Tabel 4.13. Perbandingan Antar Kriteria

| No | Kriteria | Nilai Prioritas |
|----|---------------------------|-----------------|
| 1. | Sumberdaya Ikan | 0,389 |
| 2. | Sosial | 0,186 |
| 3. | Infrastruktur (Fasilitas) | 0,179 |
| 4. | Kelembagaan | 0,127 |
| 5. | Ekonomi Daerah | 0,120 |

Hasil analisis proses hirarki analitik (PHA) dengan menggunakan *software expert choice* sebagaimana terlampir.

2. Perbandingan Antar Sub Kriteria

a. Aspek Sumberdaya Ikan

Dalam hal sumberdaya ikan didapatkan nilai prioritas tertinggi adalah faktor kualitas atau mutu sumberdaya ikan dengan nilai prioritas sebesar 0,413, kemudian faktor kuantitas atau jumlah ketersediaan sumberdaya ikan dengan nilai prioritas 0,327 dan kontinuitas atau keberlanjutan ketersediaan sumberdaya ikan di pelabuhan dengan nilai prioritas sebesar 0,260. Selengkapnya diuraikan dalam Tabel 4.14.

Tabel 4.14. Perbandingan Antar Sub Kriteria dalam Aspek Sumberdaya Ikan

| No | Sub Kriteria | Nilai Prioritas |
|----|--------------|-----------------|
| 1. | Kualitas | 0,413 |
| 2. | Kuantitas | 0,327 |
| 3. | Kontinuitas | 0,260 |

Dilihat dari aspek sumberdaya ikan juga didapatkan alternatif kebijakan pengembangan PPP Labuan yang paling prioritas untuk diterapkan dalam rangka mendukung pengembangan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sumberdaya ikan adalah pengembangan fasilitas pelabuhan dengan nilai prioritas sebesar 0,560, selanjutnya prioritas kedua adalah peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan dengan nilai prioritas sebesar 0,237 dan prioritas ketiga adalah pengembangan lembaga pengelola pelabuhan dengan nilai prioritas sebesar 0,203. Hasil analisis proses hirarki analitik (PHA) dengan menggunakan *software expert choice* sebagaimana terlampir.

b. Aspek Sosial

Untuk aspek sosial didapatkan nilai prioritas tertinggi adalah pelayanan kepelabuhanan dengan nilai prioritas 0,550, kemudian keamanan dengan nilai prioritas sebesar 0,240, dan kenyamanan dengan nilai prioritas 0,210. Tabel 4.15.

Tabel 4.15. Perbandingan antar Sub Kriteria dalam Aspek Sosial

| No | Sub Kriteria | Nilai Prioritas |
|----|--------------|-----------------|
| 1. | Pelayanan | 0,550 |
| 2. | Keamanan | 0,240 |
| 3. | Kenyamanan | 0,210 |

Dalam hal aspek sosial (pelayanan, keamanan, dan kenyamanan) didapatkan bahwa alternatif kebijakan pengembangan PPP Labuan yang paling prioritas adalah pengembangan fasilitas pelabuhan dengan nilai prioritas sebesar 0,517, kemudian prioritas kedua peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan dengan nilai prioritas 0,281, dan prioritas terakhir adalah pengembangan lembaga pengelola pelabuhan dengan nilai prioritas sebesar 0,202. Hasil analisis proses hirarki analitik (PHA) dengan menggunakan *software expert choice* sebagaimana terlampir.

c. Aspek Ekonomi Daerah

Dari aspek ekonomi daerah didapatkan nilai prioritas tertinggi adalah peningkatan pendapatan masyarakat dengan nilai prioritas sebesar 0,750 dan peningkatan pendapatan daerah dengan nilai prioritas 0,250. Berdasarkan hasil wawancara, dari aspek ini sebagian besar responden menyatakan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Artinya pengelolaan pelabuhan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat terlebih dahulu, baru kemudian akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Perbandingan antar sub kriteria dalam aspek ekonomi daerah dapat dilihat dalam Tabel 4.16. dibawah ini :

Tabel 4.16. Perbandingan Antar Sub kriteria dalam Aspek Ekonomi Daerah

| No | Sub Kriteria | Nilai Prioritas |
|----|-----------------------|-----------------|
| 1. | Pendapatan Masyarakat | 0,750 |
| 2. | Pendapatan Daerah | 0,250 |

Untuk penentuan alternatif kebijakan pengembangan PPP Labuan yang paling prioritas diterapkan dilihat dari aspek ekonomi daerah adalah pengembangan fasilitas pelabuhan dengan nilai prioritas sebesar 0,582, kemudian prioritas kedua peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan dengan nilai prioritas 0,239, dan prioritas terakhir adalah pengembangan lembaga pengelola pelabuhan dengan nilai prioritas sebesar 0,179. Hasil analisis proses hirarki analitik (PHA) dengan menggunakan *software expert choice* sebagaimana terlampir.

d. Aspek Infrastruktur (Fasilitas)

Dalam hal infrastruktur pelabuhan perikanan didapatkan bahwa prioritas tertinggi dalam pengelolaan PPP Labuan adalah ketersediaan fasilitas pelabuhan dengan nilai prioritas sebesar 0,833 dan aspek kualitas fasilitas pelabuhan dengan nilai prioritas sebesar 0,167. Selengkapnya dalam Tabel 4.17.

Tabel 4.17. Perbandingan Antar Sub Kriteria dalam Aspek Fasilitas

| No | Sub Kriteria | Nilai Prioritas |
|----|--------------|-----------------|
| 1. | Ketersediaan | 0,833 |
| 2. | Kualitas | 0,167 |

Melihat perbandingan antar sub kriteria dalam aspek fasilitas diatas dapat dikemukakan bahwa persepsi *stakeholder* terkait pengelolaan PPP Labuan akan kebutuhan ketersediaan fasilitas pelabuhan sangat mendesak untuk diwujudkan. Hal ini dapat dilihat dari nilai prioritas yang cukup ekstrim yakni mencapai 0,833.

Untuk penentuan alternatif kebijakan pengembangan PPP Labuan yang paling prioritas diterapkan dilihat dari aspek infrastruktur (fasilitas) juga sesuai dengan hasil analisis diatas yakni menyatakan bahwa pengembangan fasilitas pelabuhan merupakan hal yang paling prioritas untuk dilaksanakan dengan nilai prioritas sebesar 0,541, kemudian prioritas kedua peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan dengan nilai prioritas 0,283, dan prioritas terakhir adalah pengembangan lembaga pengelola pelabuhan dengan nilai prioritas sebesar 0,176. Hasil analisis proses hirarki analitik (PHA) dengan menggunakan *software expert choice* sebagaimana terlampir.

e. Aspek Kelembagaan

Untuk aspek kelembagaan dalam hal pengelolaan PPP Labuan didapatkan bahwa prioritas tertinggi adalah pembentukan organisasi pelabuhan dengan nilai prioritas sebesar 0,550. Prioritas kedua adalah faktor ketersediaan perangkat hukum dengan nilai prioritas sebesar 0,240 dan prioritas ketiga adalah faktor sumberdaya manusia dengan nilai prioritas 0,210. Selengkapnya dalam Tabel 4.18.

Tabel 4.18. Perbandingan Antar Sub Kriteria dalam Aspek Kelembagaan

| No | Sub Kriteria | Nilai Prioritas |
|----|-----------------|-----------------|
| 1. | Organisasi | 0,550 |
| 2. | SDM | 0,240 |
| 3. | Perangkat Hukum | 0,210 |

Untuk penentuan alternatif kebijakan pengembangan PPP Labuan yang paling prioritas diterapkan dilihat dari aspek kelembagaan juga sesuai dengan hasil analisis diatas yakni menyatakan bahwa pengembangan fasilitas pelabuhan merupakan hal yang paling prioritas untuk dilaksanakan dengan nilai prioritas sebesar 0,542, kemudian prioritas kedua peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan dengan nilai prioritas 0,279, dan prioritas terakhir adalah pengembangan lembaga pengelola pelabuhan dengan nilai prioritas sebesar 0,179. Hasil analisis proses hirarki analitik (PHA) dengan menggunakan *software expert choice* sebagaimana terlampir.

3. Perbandingan Antar Alternatif Kebijakan

Untuk mendapatkan perbandingan keseluruhan proses hirarki analitik diatas dilakukan perbandingan antar 3 (tiga) alternatif kebijakan, meliputi : pengembangan fasilitas pelabuhan, peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan, dan pengembangan lembaga pengelola pelabuhan. Dari proses itu didapatkan bahwa prioritas tertinggi adalah pengembangan fasilitas pelabuhan dengan nilai prioritas sebesar 0,548. Prioritas kedua adalah peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan dengan nilai prioritas sebesar 0,260 dan

prioritas ketiga adalah pengembangan lembaga pengelola pelabuhan dengan nilai prioritas sebesar 0,192. Selengkapnya dalam tabel 4.19.

Tabel 4.19. Perbandingan Antar Alternatif Kebijakan

| No | Alternatif Kebijakan | Nilai Prioritas |
|----|--|-----------------|
| 1. | Pengembangan fasilitas pelabuhan | 0,548 |
| 2. | Peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan | 0,260 |
| 3. | Pengembangan lembaga pengelola pelabuhan | 0,192 |

Hasil analisis proses hirarki analitik (PHA) dengan menggunakan *software expert choice* sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil analisis sistem dan sub sistem dalam penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan serta memperhatikan hasil analisis kebijakan pengembangan pelabuhan perikanan menunjukkan adanya hubungan keterkaitan (korelasi) positif. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil alternatif kebijakan yang direkomendasikan adalah pengembangan fasilitas pelabuhan, dimana alternatif kebijakan ini memiliki kesesuaian dengan kondisi aktual di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan yang masih memerlukan pengembangan fasilitas pelabuhan meliputi fasilitas pokok berupa : dermaga sepanjang 160 meter, dan kedalaman kolam pelabuhan sedalam ± 2 meter. Kenyataan ini juga diperkuat dari kenyataan bahwa kondisi umum fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan (Tabel 4.9) secara umum masih dalam tahap konstruksi.

Hal lain yang juga dihasilkan dari analisis alternatif kebijakan adalah peningkatan pelayanan jasa dan pengembangan lembaga pengelola pelabuhan. Hal ini juga sesuai dengan kenyataan di lokasi penelitian bahwa tingkat pelayanan dan kondisi kelembagaan penyelenggara pelabuhan masih harus dibenahi/ditingkatkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum pengelolaan PPP Labuan masih memerlukan upaya peningkatan khususnya terkait aspek fasilitas, sosial dan kelembagaan pelabuhan perikanan. Aspek fasilitas terkait ketersediaan prasarana pokok dan fungsional yang belum memadai, sedangkan aspek sosial menyangkut pelayanan, kenyamanan dan keamanan dalam penyelenggaraan PPP Labuan. Aspek lainnya yang juga cukup penting adalah aspek kelembagaan yang meliputi pembentukan organisasi pengelola pelabuhan, sumberdaya manusia, dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukung penyelenggaraan PPP Labuan.
2. Dalam hal sumberdaya ikan dengan melihat pola musim penangkapan, tingkat produksi serta jenis ikan yang didaratkan di PPP Labuan dapat disampaikan bahwa keragaman jenis ikan yang didaratkan sangat dipengaruhi oleh keragaman unit penangkapan (kapal dan alat penangkapan ikan). Untuk mendorong peningkatan ketersediaan sumberdaya ikan dapat dilakukan dengan melakukan manajemen penangkapan yang berorientasi pada pengaturan alat penangkapan ikan serta perbaikan fasilitas pelabuhan yang dapat mendorong peningkatan pendaratan armada penangkapan lain (khususnya yang belum ada di PPP Labuan) untuk mendaratkan hasil penangkapannya di PPP Labuan
3. Untuk aspek fasilitas diperlukan penambahan fasilitas dermaga sepanjang 126 meter, dan penambahan kedalaman kolam pelabuhan sedalam 205 cm. Selain itu diusulkan integrasi gedung pelelangan menjadi 1 (satu) gedung pelelangan yang lebih representatif dan higienis.
4. Dalam hal penyelenggaraan aktivitas pembongkaran, penyortiran ikan, pengangkutan ke TPI, penanganan ikan di TPI, serta penggunaan es dalam penanganan ikan di PPP Labuan dapat disimpulkan bahwa aktivitas dimaksud akan berdampak pada terciptanya kualitas sumberdaya ikan. Semakin baik penyelenggaraan aktivitas di atas maka akan semakin baik pula kualitas ikan yang didaratkan, begitu pula sebaliknya. Selain hal tersebut,

dalam hal penyelenggaraan pelelangan ikan masih ditemukan ketidaksesuaian pola penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Pandeglang No.12 Tahun 2001.

5. Dalam hal kelembagaan, perlu dilakukan optimalisasi peran lembaga kepelabuhanan agar dapat mendukung operasionalisasi PPP Labuan. Selain itu masih ditemukan kelemahan aspek legal (regulasi) dalam penyelenggaraan PPP Labuan.
6. Kebijakan pengembangan PPP Labuan yang paling prioritas adalah pengembangan fasilitas pelabuhan, kemudian prioritas kedua adalah meningkatkan pelayanan jasa kepelabuhanan, dan prioritas ketiga adalah pengembangan lembaga pengelola pelabuhan.

B. Rekomendasi

Dari kesimpulan di atas disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Diusulkan pembangunan dermaga sepanjang 126 meter dan penambahan kedalaman kolam pelabuhan sedalam 205 cm. selain itu diusulkan pembangunan 1 (satu) unit TPI higienis yang merupakan integrasi 2 (dua) TPI yang telah ada.
2. Diusulkan pembentukan organisasi pelabuhan dan peraturan-peraturan yang mendukung operasional PPP Labuan. Peraturan-peraturan yang dibutuhkan meliputi: Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (PPI), Peraturan Daerah tentang Penetapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kelautan dan Perikanan, Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Tata Cara, Sistem dan Prosedur Pemungutan Retribusi Daerah Sektor Kelautan dan Perikanan, Peraturan Gubernur tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Perikanan Banten, Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pemungutan PAD bidang Jasa Kepelabuhanan Perikanan bagi UPTD Pelabuhan Perikanan.
3. Untuk mendukung pelayanan kepelabuhanan diusulkan peningkatan fasilitas penanganan (*handling*) ikan dari sejak dermaga sampai ke TPI.
4. Dalam hal penyelenggaraan pelelangan ikan disarankan untuk melakukan refungsionalisasi penyelenggaraan pelelangan ikan melalui: (1) pengembangan manajemen TPI yang sehat dengan mengutamakan kepentingan nelayan, (2) refungsionalisasi lembaga pengelola, (3) peningkatan SDM pengelola pelelangan, dan (4)

peningkatan pengawasan penyelenggaraan pelelangan ikan oleh instansi yang berkompeten.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Adelin Nasdion. (2003). Deregulasi Kepelabuhanan di Indonesia, Makalah disampaikan dalam *Conference on 'Decentralization, Regulatory Reform and the Business Climate'* diselenggarakan oleh *Partnership for Economic Growth United States Agency for International Development (PEG - USAID)*. di Hotel Borobudur Jakarta 12 Agustus 2003. PD. Pelabuhan Cilegon Mandiri.
- Anonim. (2007). Konsep Dasar Sistem Informasi. Diambil 10 Oktober 2007 dari situs <http://library.gunadarma.ac.id/files/disk1/9/>.
- Anonim. (2007). Perancangan Sistem Informasi. Diambil 07 Oktober 2007 dari situs <http://staffsite.gunadarma.ac.id/wsilfi/index.php?stateid=download&id=1004&part=files>.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten (2007). *Kajian Pembentukan Pelabuhan Perikanan Pantai Provinsi Banten*. Banten.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2001). *Buku Pintar Pengembangan Prasarana Perikanan*. Jakarta.
- Eriyanto. (1998). Ilmu Sistem, Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen. Bogor: Penerbit IPB Press.
- Haluan, Jhon, dkk. (2007). Studi Lapangan. *Buku Materi Pokok Program Pascasarjana Magister Manajemen Perikanan UT*. Jakarta : Penerbit Universitas Terbuka.
- Hartini. (2007). Pengantar Sistem Informasi. diambil 10 Oktober 2007 dari situs www.ilkom.unsri.ac.id/dosen/hartini/materi/I_PengantarSI.pdf.
- Herman, dkk. (2007) Metodologi Penelitian. *Buku Materi Pokok Program Pascasarjana Magister Manajemen Perikanan UT*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Junianto. (2003). Teknik Penanganan Ikan. Jakarta: Penerbit Penebar Swadaya.
- Kusumastanto (2007). *Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan, Perikanan dan Perhubungan Laut Dalam Abad XXI*. Diambil 08 Oktober 2007 dari situs <http://www.indomarine.or.id>.
- Laga, Asbar. (2005). Analisis sistem pengelolaan pelabuhan perikanan: Studi kasus di pangkalan pendaratan ikan paotere makassar. *Tesis Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor*. Bogor.
- Rohim, Akhmad. (2007). Analisis Sistem. Diambil 07 Oktober 2007 dari situs [http://www.arsys.5gbfree.com/Files/RPL-3-AnalisisSistem\(1\).pdf](http://www.arsys.5gbfree.com/Files/RPL-3-AnalisisSistem(1).pdf).

Suryana, Erwin. (2000). *Manajemen Pelabuhan Khusus (Pelsus) Guna Optimalisasi Pelayanan Pemakai Jasa Pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu Sukabumi, Jawa Barat. Tugas Akhir Akademi Maritim Cirebon. Cirebon.*

Syahyuti. (2008). *Sistem. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Diambil 24 Januari 2008 dari situs <http://www.geocities.com/syahyuti/Sistem.pdf>.*

Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pelabuhan Perikanan

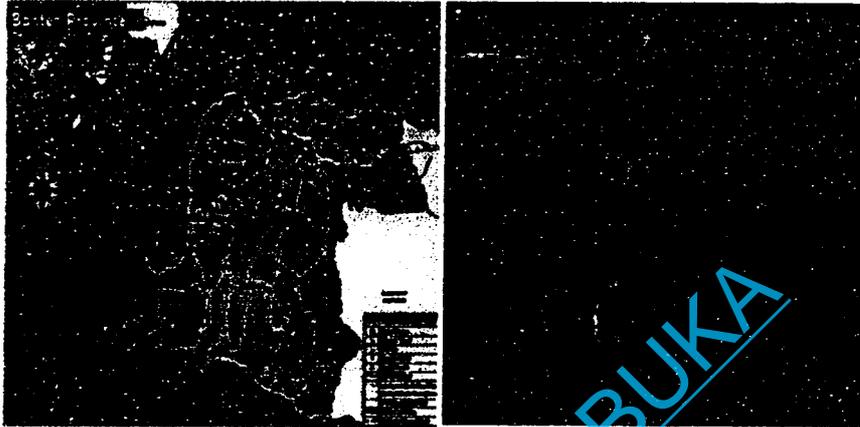
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan

UNIVERSITAS TERBUKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

UNIVERSITAS TERBUKA

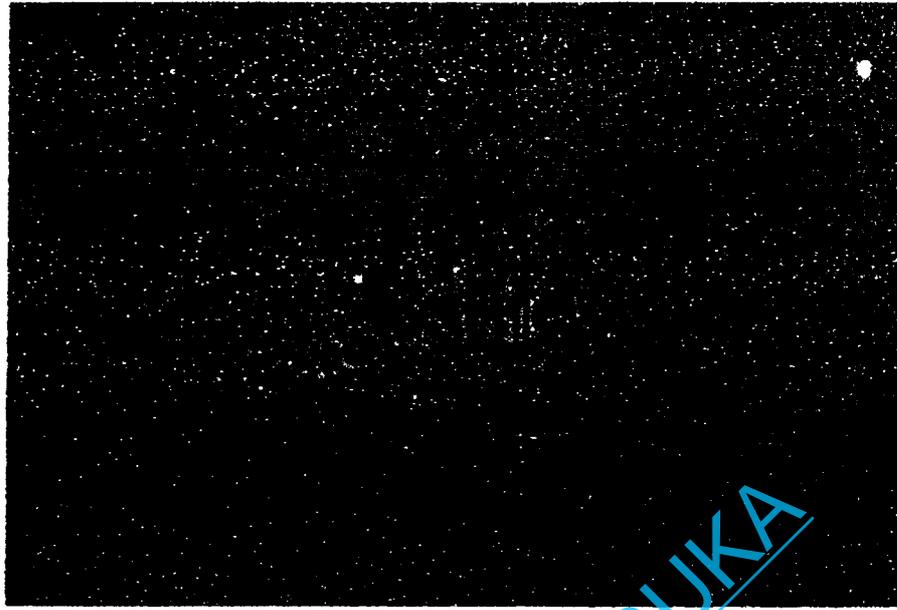
LAMPIRAN DOKUMENTASI



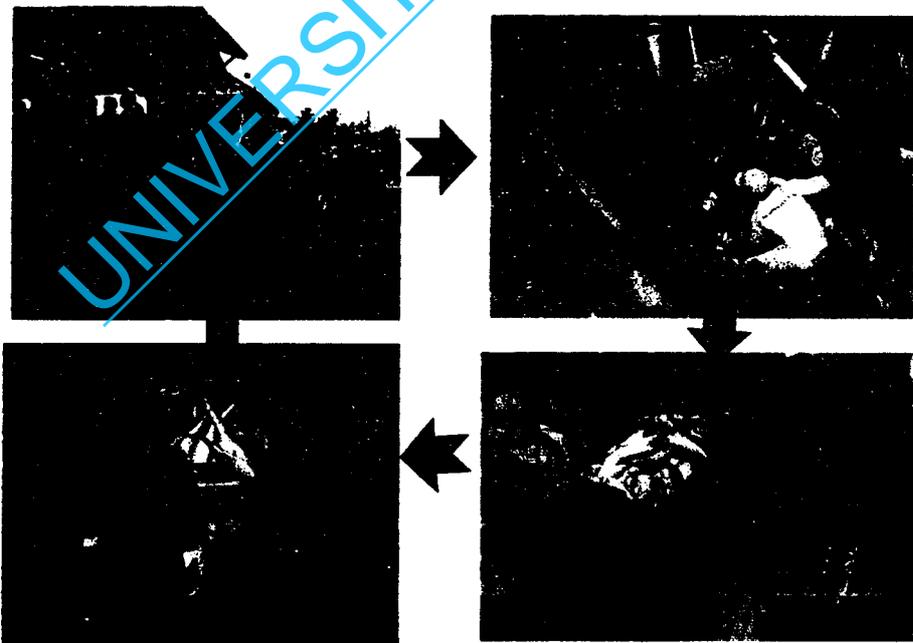
Lokasi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan



Dermaga di PPP Labuan



Kolam Pelabuhan



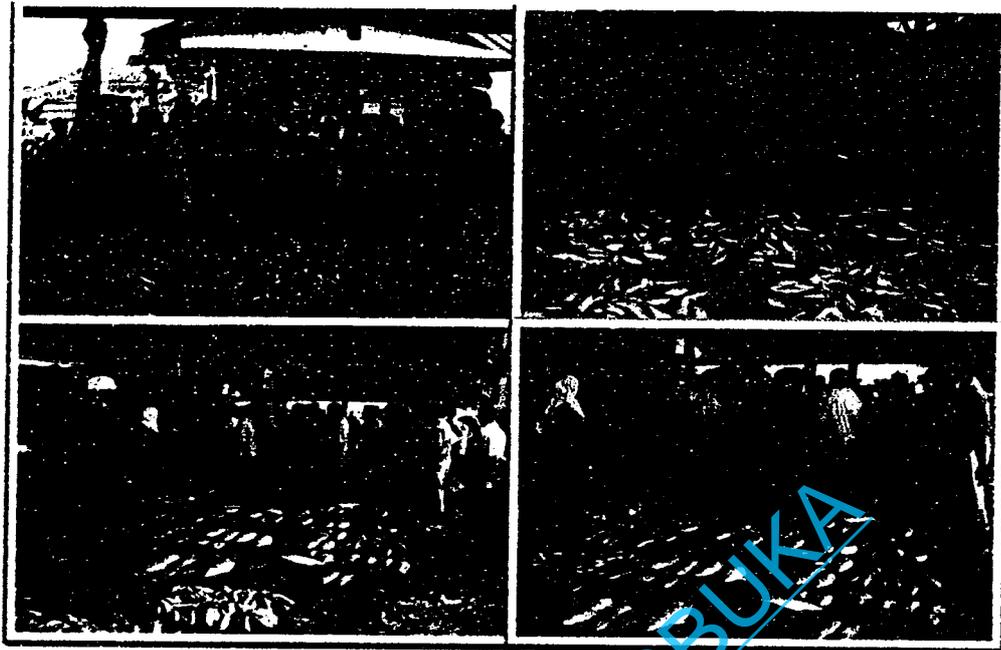
Aktivitas Bongkar Hasil Tangkapan di PPP Labuan

Proses Pengangkutan ke TPI



Penanganan Ikan di TPI

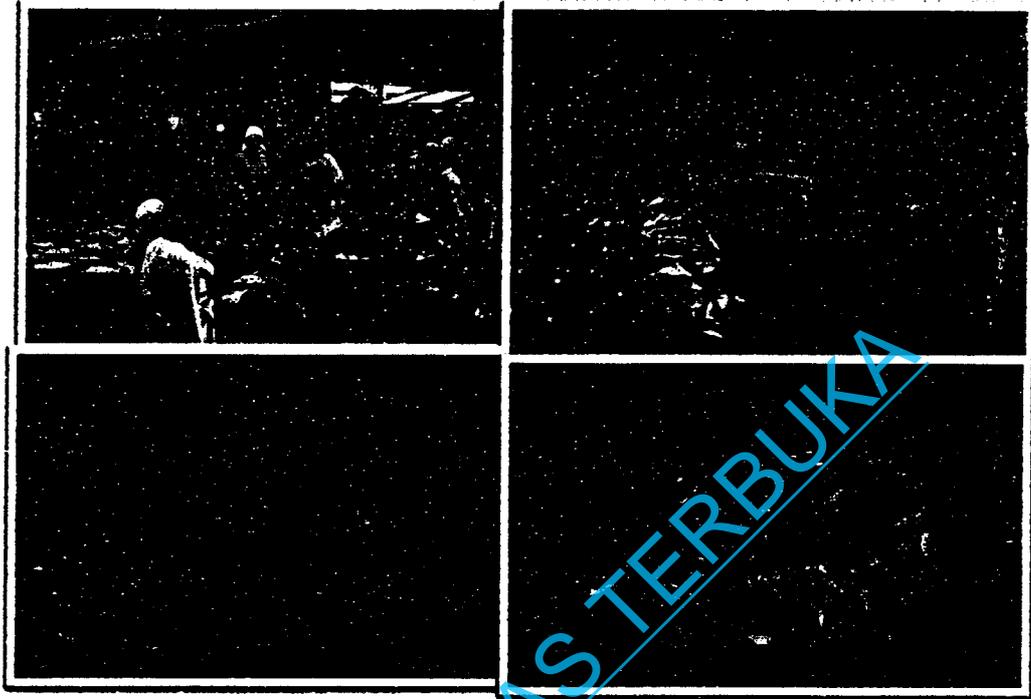




Proses Pelelangan Ikan di TPI Labuan



Penggunaan Es dalam Penangkapan dan Penanganan Ikan di PPP Labuan



Aktivitas Penanganan Ikan pasca Penangkapan di PPP Labuan

Model Name: Pengelolaan PPP Labuan**Treeview**

- **Sosial (L: .186)**
 - **Pelayanan (L: .550)**
 - **Kenyamanan (L: .210)**
 - **Keamanan (L: .240)**

Alternatives

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| [REDACTED] | .517 |
| [REDACTED] Keamanan | .281 |
| [REDACTED] Pengelola Pelabuhan | .202 |

* *Ideal mode*

Erwin

Model Name: Pengelolaan PPP Labuan

**Priorities with respect to:
Goal: Pengelolaan PPP Labuan**

| | | |
|----------------------------------|-------------|--|
| SDI | .389 |  |
| Sosial | .186 |  |
| Ekonomi Daerah | .120 |  |
| Infrastruktur (Fasilitas) | .179 |  |
| Kelembagaan | .127 |  |

**Inconsistency = 0.09
with 0 missing judgments.**

UNIVERSITAS TERBUKA

Erwin

Model Name: Pengelolaan PPP Labuan

Treeview

- **Infrastruktur (Fasilitas) (L: .179)**
 - **Ketersediaan (L: .833)**
 - **Kualitas (L: .167)**

Alternatives

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| [REDACTED] | .541 |
| [REDACTED] buhanan | .283 |
| [REDACTED] ga Pengelola Pelabuhan | .176 |

UNIVERSITAS TERBUKA

* *Ideal mode*

Erwin

Model Name: Pengelolaan PPP Labuan**Treeview**

- **Ekonomi Daerah (L: .120)**
 - **Pendapatan Masyarakat (L: .750)**
 - **Pendapatan Daerah (L: .250)**

Alternatives

| | |
|---------------------------------|-------------|
| | .582 |
| Kepelabuhanan | .239 |
| Jaga Pengelola Pelabuhan | .179 |

UNIVERSITAS TERBUKA

* *Ideal mode*

Erwin

Model Name: Pengelolaan PPP Labuan

Synthesis: Summary

Synthesis with respect to:

Goal: Pengelolaan PPP Labuan

Overall Inconsistency = .08

| | | |
|---|-------------|--|
| Pengembangan Fasilitas Pelabuhan | .548 |  |
| Peningkatan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan | .280 |  |
| Pengembangan Lembaga Pengelola Pelabuhan | .182 |  |

UNIVERSITAS TERBUKA

Erwin